



2022

LAPORAN AKHIR

Rencana Aksi
Daerah Pangan dan Gizi
Kabupaten Gresik

BAB 1



PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pangan dan gizi merupakan faktor penting dalam pembangunan manusia Indonesia. Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling utama dalam pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemenuhan kebutuhan pangan akan mendukung tercapainya status gizi yang baik sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pembangunan pangan dan gizi adalah sebuah investasi strategis yang akan memberikan dampak dalam jangka panjang bagi peningkatan kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia. Pengaruh pangan dan gizi begitu signifikan sehingga pemerintah menetapkan program percepatan pangan dan gizi utamanya pada 1000 hari pertama kehidupan (Perpres No. 42 Tahun 2013).

Sejalan dengan hal tersebut, maka ketahanan pangan dan gizi menjadi salah satu keadaan yang hendak dicapai dalam pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 untuk mendukung upaya membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Pendekatan multisektor menjadi pilihan pendekatan yang akan diterapkan dalam mewujudkan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2021 – 2024. Aspek kesehatan menjadi indikator dominan dalam output rencana aksi pangan dan gizi, sehingga dalam pencapaian aspek ini sangat membutuhkan dukungan dari multi sektor yang saling bersinergi dalam proses dan pendekatannya. Keberhasilan suatu bangsa ditentukan



oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu SDM yang memiliki fisik yang tangguh, mental kuat, kesehatan yang prima serta cerdas. Hal tersebut sangat ditentukan oleh gizi yang baik, dan status gizi yang baik ditentukan oleh asupan pangan yang dikonsumsi dan status kesehatan.

Pengaturan tentang pangan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, yang menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi dasar setiap rakyat. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa upaya perbaikan gizi masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat. Berbagai penelitian membuktikan bahwa masalah gizi adalah masalah intergenerasi, yaitu ibu hamil yang kurang gizi akan melahirkan bayi kurang gizi. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut melalui pelayanan berkelanjutan pada periode kesempatan emas kehidupan (*windows of opportunities*), yaitu sejak janin dalam kandungan, dan bayi baru lahir sampai anak berusia 2 tahun. Penurunan stunting dapat diselesaikan dengan meningkatkan akses keterjangkauan pangan setiap rumah tangga, dimana akses pangan setiap individu dalam rumah tangga sangat tergantung pada ketersediaan pangan dan kemampuan untuk mengaksesnya secara berkelanjutan. Kemampuan mengakses yang dimaksud memiliki makna kemampuan mengakses yang dipengaruhi oleh daya yang berkaitan dengan tingkat pendapatan dan kemiskinan seseorang.

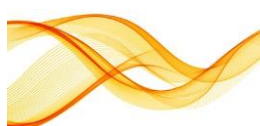
Rendahnya aksesibilitas pangan, yaitu kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan anggota keluarganya, mengancam penurunan konsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman di tingkat rumah tangga. Pada akhirnya akan berdampak pada semakin beratnya masalah kekurangan gizi masyarakat, terutama pada kelompok rentan yaitu ibu, bayi, dan anak. Solusi yang dapat diambil dalam penyelesaian permasalahan tersebut dapat melalui perbaikan gizi masyarakat, aksesibilitas pangan, mutu dan keamanan pangan. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan koordinasi dalam kelembagaan pangan dan gizi juga dapat menjadi solusi terkait permasalahan tersebut. Dimana keberhasilan dalam penyelesaian permasalahan tersebut ditandai dengan status gizi masyarakat yang semakin membaik dan ketersediaan pangan yang mencukupi kebutuhan penduduk Kabupaten Gresik.



Program-program dalam rangka pembangunan ketahanan pangan dan gizi harus terpadu, terukur keberhasilannya dan berkesinambungan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Pusat telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2021 – 2024, demikian pula Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyusun Rancangan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 2021 – 2024, sehingga perlu ditindaklanjuti oleh daerah. Maka dari itu, diperlukan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Gresik dalam penjabaran operasional dari RPJMD Kabupaten Gresik dalam pembangunan pangan dan gizi yang bersifat terpadu (integrated), bertahap dan berkesinambungan (sustainability), serta terukur keberhasilannya (measurable), yang berisi panduan dan arahan serta acuan bagi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring-evaluasi kegiatan pembangunan ketahanan pangan dan gizi bagi Institusi Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), perguruan tinggi/ litbang, organisasi non pemerintah, institusi masyarakat dan stakeholder lain.

1.2. KEDUDUKAN RAD-PG DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

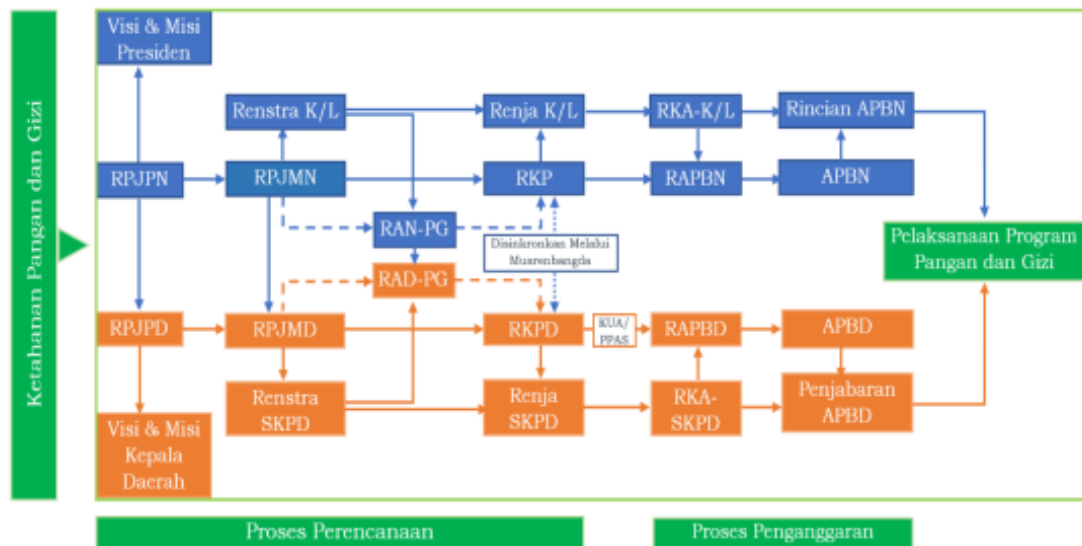
Melihat komitmen pemerintah Indonesia untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional serta ketahanan pangan dan gizi, telah ditetapkan beberapa kebijakan strategis, rencana aksi atau strategi nasional sehingga menjadi hal penting untuk memastikan adanya sinkronisasi kebijakan kebijakan tersebut. Posisi RAN-PG terhadap kebijakan strategis, strategi nasional maupun RAN lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat dilihat dalam Gambar 1.1. yang menunjukkan RAN-PG berfungsi sebagai strategi implementasi tematik pembangunan pangan dan gizi dan merupakan bagian dari Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengacu Kepada RPJMN 2020-2024 dan agenda TPB/SDGs, yang dalam penyusunan dan pelaksanaannya disinkronkan dengan gerakan nasional atau rencana aksi lain yang mendukung pembangunan pangan dan gizi seperti Stranas Percepatan Penurunan *Stunting*, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), serta Stranas PUG melalui PPRG.





Gambar 1. 1 Posisi RAN-PG dan RAD-PG Dalam Mendukung Tercapainya Tujuan RPJMN 2020-2024 dan TPB/SDGs

Mendukung kebijakan tersebut di atas, peran RAN-PG di Indonesia menjadi penting sebagai salah satu instrumen koordinasi pemerintah dengan sektor atau pemangku kepentingan dalam mencapai TPB, terutama tujuan kedua. Sedangkan dalam mendukung pencapaian tujuan RPJMN, penyusunan RAN-PG diarahkan untuk penajaman program/kegiatan dalam pencapaian tujuan pembangunan di bidang pangan dan gizi dalam RPJMN termasuk yang sudah dijabarkan di dalam Renstra Kementerian dan Lembaga. Dengan demikian dokumen RAN-PG dapat diacu untuk menyusun Renja kementerian/lembaga dan RKP. Sama halnya di daerah, RAD-PG yang disusun pemerintah daerah pada dasarnya merupakan penajaman program dan kegiatan di bidang pangan dan gizi dalam RPJMD dan Renstra SKPD, sehingga dapat diacu untuk menyusun Renja SKPD dan RKPD. Adapun Gambaran umum integrasi pembangunan pangan dan gizi ke dalam rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat lebih lanjut dalam Gambar 1.2.



(Sumber: Dimodifikasi dari Bappenas, 2020)

Gambar 1.2 Integrasi Pembangunan Pangan dan Gizi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan

Rencana aksi pangan dan gizi telah dikembangkan dengan mempertimbangkan determinan dan permasalahan multisektoral di berbagai level. RAD-PG akan disusun oleh pemerintah daerah dengan mengacu kepada RAN-PG dengan menggunakan pendekatan yang sama, yaitu aksi penajaman terhadap kegiatan pangan dan gizi yang sudah ada serta mengisi gap yang belum terfasilitasi ke dalam dokumen perencanaan yang sudah ada.

1.3. TUJUAN PENYUSUNAN

Maksud :

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan panduan, arahan, serta acuan kepada OPD, DPRD, Perguruan Tinggi/ Litbang, Institusi Pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya untuk berperan serta meningkatkan kontribusi yang optimal dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan penurunan stunting di Kabupaten Gresik.



Tujuan :

Berdasarkan maksud dari kegiatan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Gresik, maka kegiatan tersebut bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan pemahaman seluruh stakeholder terkait dari masyarakat dalam peran sertanya untuk pemantapan ketahanan pangan dan penurunan stunting;
- 2) Meningkatkan kemampuan menganalisis perkembangan situasi pangan dan gizi di setiap wilayah di Kabupaten Gresik sehingga mampu menetapkan prioritas penanganan dalam masalah pangan dan gizi, serta mampu memantau dan mengevaluasi perkembangan pangan dan gizi di Kabupaten Gresik;
- 3) Meningkatkan koordinasi pembangunan ketahanan pangan dan penurunan stunting secara jelas dan terinci untuk membangun sinergi, integrasi, dan koordinasi yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi atas tugas masing-masing stakeholder.

1.4. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RAD-PG

Landasan hukum Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Gresik antara lain:

- ✓ Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- ✓ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227, 2012. Tambahan Negara Republik Indonesia No. 5360);
- ✓ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- ✓ Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 136);
- ✓ Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- ✓ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- ✓ Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 124/M.PPN/HK/10/2021 tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2021-2024;
- ✓ Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
- ✓ Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024.



BAB 2



ANALISIS SITUASI

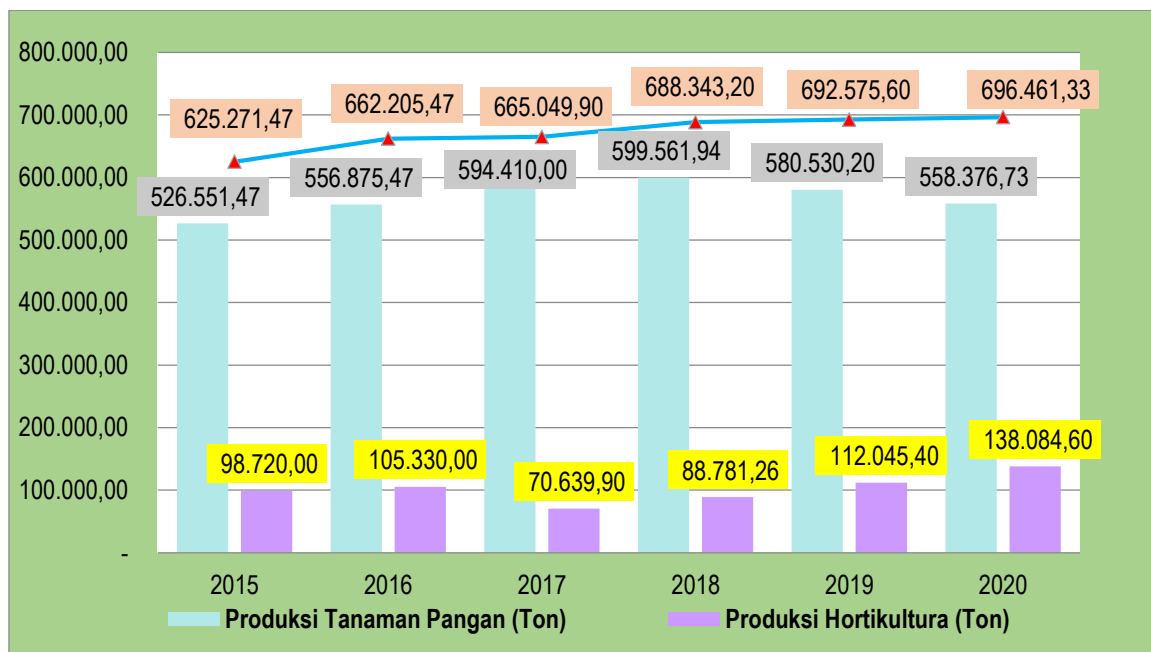
2.1. SITUASI SAAT INI

2.1.1. Kondisi Ketersediaan Pangan

Aspek Ketersediaan pangan (food availability) adalah jumlah produksi bahan pangan sereal yang mengandung karbohidrat sebagai sumber energi seperti beras, jagung, ubi, gandum, ketela. Ketersediaan pangan yang cukup diartikan bahwa jumlah pangan yang dibutuhkan cukup bagi masyarakat baik berupa bahan makanan yang berasal dari tumbuhan, hewan ternak dan lain-lain (Sumarsono dkk, 2017). Ketersediaan bahan pangan tersebut harus dalam jumlah yang cukup, aman dikonsumsi, bergizi serta mampu mencukupi kebutuhan kalori tiap individu (Rustanti, 2016).

Ketersediaan Pangan Kabupaten Gresik ditunjukkan dengan data produksi dan produktivitas tanaman pangan, tanaman sayuran, buah, perikanan dan peternakan serta perbandingan antara ketersediaan dengan kebutuhan pangan Kabupaten Gresik.



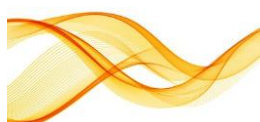


Gambar 2. 1 Data Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gresik Tahun 2015-2020

Kabupaten Gresik memiliki lahan pertanian yang ditanami tanaman pangan seluas 89.393,6 Ha pada Tahun 2020. Jika ditinjau berdasarkan produktivitasnya, produktivitas tanaman pangan mengalami peningkatan dari tahun 2015-2020. Produktivitas tanaman pangan pada tahun 2015 sebesar 526.551,47 ton mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2020, produktivitas tanaman pangan menjadi 558.376,73 Ton. Sedangkan untuk produktivitas komoditas tanaman hortikultura juga mengalami peningkatan dari tahun 2015-2020. Produktivitas tanaman hortikultura pada tahun 2015 sebesar 625.271,47 ton mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2020, produktivitas tanaman hortikultura menjadi 696.461,33 Ton.

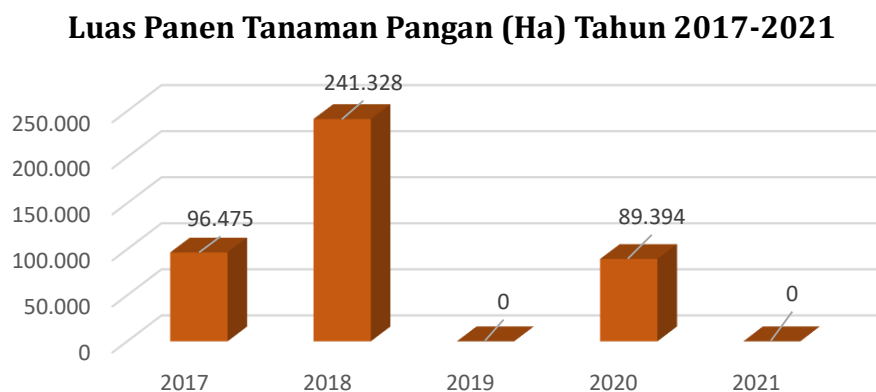
Tabel 2. 1 Data Luas Panen Tanaman Pangan (Ha) di Kabupaten Gresik Tahun 2017-2021

No	Komoditas	2017	2018	2019	2020	2021
1	Padi	67.963	60.406	-	66.196,7	-
2	Jagung	23.964	180.607	-	21.084	-
3	Kedelai	501	315	-	64,5	-
4	Kacang tanah	1.201	-	-	865,4	-



No	Komoditas	2017	2018	2019	2020	2021
5	Ubi kayu	471,0	-	-	676,0	-
6	Ubi Jalar	229,8	-	-	47,0	-
7	Kacang Hijau	2.145	-	-	460,0	-
Total		96.475	241.328	-	89.394	-

Sumber : Kabupaten Gresik Dalam Angka 2018-2022

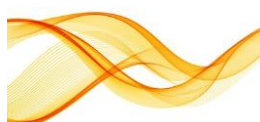


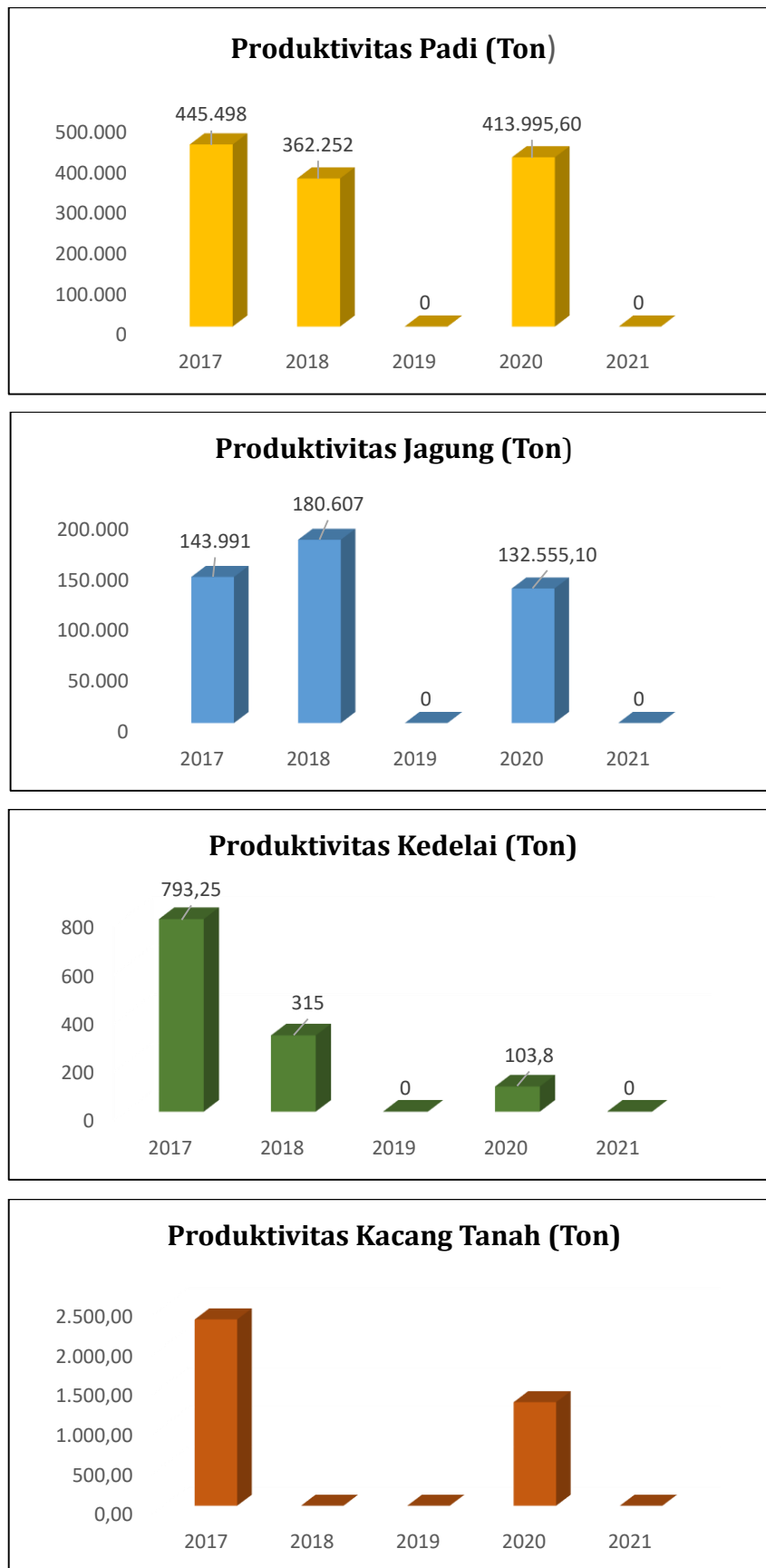
Gambar 2. 2 Grafik Luas Panen Tanaman Pangan (Ha) Tahun 2017 - 2021

Tabel 2. 2 Data Produksi Tanaman Pangan (Ton) di Kabupaten Gresik Tahun 2017-2021

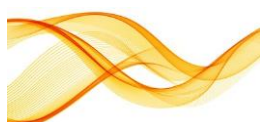
No	Komoditas	2017	2018	2019	2020	2021
1	Padi	445.498	362 252	-	413.995	-
2	Jagung	143.991	180 607	-	132.555	-
3	Kedelai	793,25	315	-	103,8	-
4	Kacang tanah	2.345,31	-	-	1.303,3	-
5	Ubi kayu	-	-	-	8.710,9	-
6	Ubi Jalar	-	-	-	972,1	-
7	Kacang Hijau	3.485,25	-	-	736,0	-
Total		150 614,81	315	0	558 376,8	0

Sumber : Kabupaten Gresik Dalam Angka 2018-2022





Gambar 2.3 Grafik Produktivitas Tanaman Pangan (Ton) Tahun 2017 - 2021

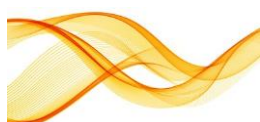


Jika ditinjau berdasarkan produksinya, produksi padi dan jagung mengalami penurunan dari tahun 2017-2021. Produksi jagung pada tahun 2017 sebesar 143.991 ton mengalami penurunan hingga pada tahun 2020 produksi jagung menjadi 132.555,1 ton . Untuk produksi komoditas padi, pada tahun 2017 sebesar 445.498 ton mengalami penurunan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 menjadi 413.995 kwintal/ha. Penurunan produksi yang terjadi, dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya disebabkan oleh perubahan faktor cuaca yang berakibat pada kualitas panen. Jika dibandingkan antara produksi dengan produktivitas komoditas pertanian pangan dapat diambil kesimpulan bahwa luasan lahan pertanian tanaman pangan mengalami penurunan.

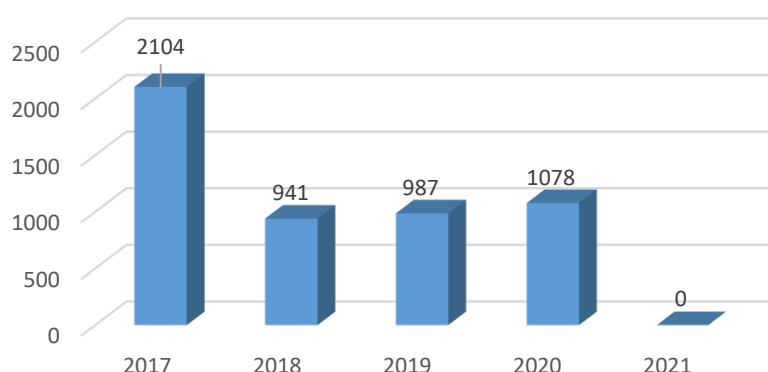
Tabel 2. 3 Data Luas Panen Tanaman Holtikultura (Ha) di Kabupaten Gresik Tahun 2017-2021

No	Tanaman Sayur	2017	2018	2019	2020	2021
1	Bawang merah	23	15	21	21	-
2	Petsai/Sawi	92	55	48	67	-
3	Kacang Panjang	107	72	59	44	-
4	Cabe Besar	253	260	421	601	-
5	Cabe Rawit	923	1 542	1 566	1 636	-
6	Tomat	91	78	62	40	-
7	Terung	153	102	84	56	-
8	Ketimun	11	17	24	7	-
9	Kangkung	185	160	135	137	-
10	Bayam	161	147	109	85	-
11	Melon Semangka	70	33	14	17	-
12	Blewah	35	2	10	3	-

Sumber : Kabupaten Gresik Dalam Angka 2018-2022



Luas Panen Tanaman Holtikultura (Ha)



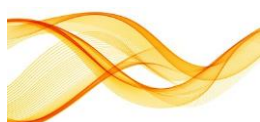
Gambar 2. 4 Grafik Luas Panen Tanaman Holtikultura (Ha) Tahun 2017-2021

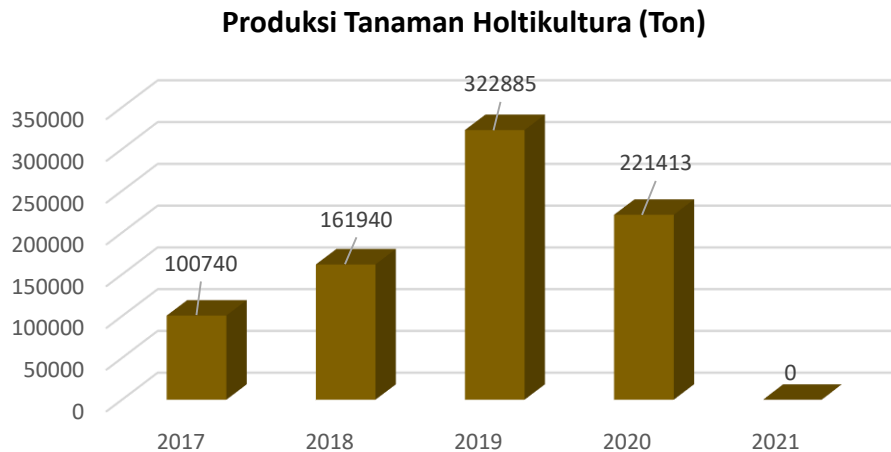
Pada tahun 2017-2021, lahan panen untuk tanaman sayuran di Kabupaten Gresik mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017, luas lahan panen tanaman sayur sebesar 2.104 Ha dengan 12 komoditas unggulan yakni bawang merah, petsai/sawi, kacang panjang, cabai besar, cabai rawit, tomat, terung, ketimun, kangkung, bayam, melon semangka, dan blewah. Namun pada tahun 2020, lahan panen tanaman sayur mengalami penurunan sebesar 1078 Ha.

Tabel 2. 4 Data Produksi Tanaman Holtikultura (Ton) di Kabupaten Gresik Tahun 2017-2021

No	Tanaman Sayur	2017	2018	2019	2020	2021
1	Bawang merah	1.048	1.270	1.417	1.652	-
2	Petsai/Sawi	5.134	3.004	2.246	3.344	-
3	Kacang Panjang	2.764	4485	5.216	6.361	-
4	Cabe Besar	9.923	20.971	44.163	21.770	-
5	Cabe Rawit	24.181	90.893	222.909	152.592	-
6	Tomat	6.449	5.887	11.070	11 283	-
7	Terung	23.846	16.067	17.444	20.246	-
8	Ketimun	1.726	4.253	3.515	1.395	-
9	Kangkung	7.929	6.226	6.626	7.084	-
10	Bayam	5.250	4.434	4.098	3.638	-
11	Melon Semangka	8.630	3.950	2.481	3.091	-
12	Blewah	3.860	500	1.700	240	-

Sumber : Kabupaten Gresik Dalam Angka 2018-2022





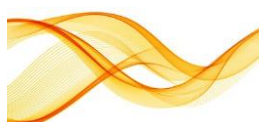
Gambar 2.5 Grafik Produksi Tanaman Holtikultura (Ton) Tahun 2017-2021

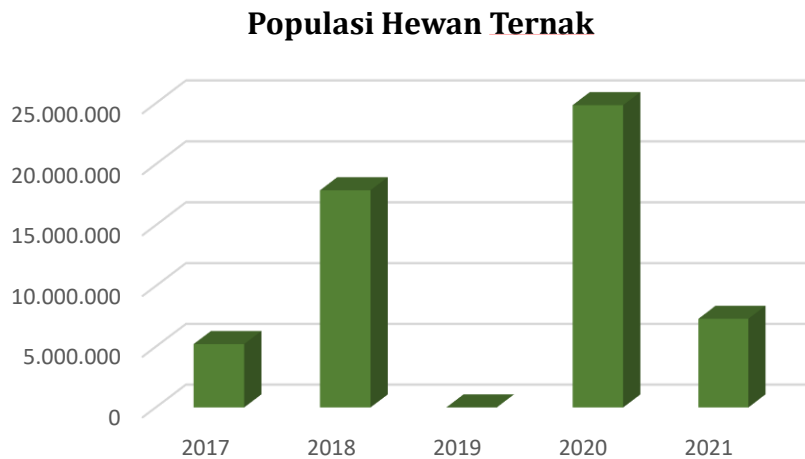
Berdasarkan produksinya, komoditas utama untuk tanaman holtikultura adalah cabe rawit, cabe besar, dan terung. Produksi cabe rawit dan cabe besar mengalami peningkatan dari tahun 2017-2021. Produksi cabe rawit pada tahun 2017 sebesar 24.181 ton mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 produksi cabe rawit menjadi 152.592 ton . Untuk produksi komoditas cabe besar, pada tahun 2017 sebesar 9.923 ton mengalami peningkatan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 menjadi 21.770 kwintal/ha.

Tabel 2.5 Data Populasi Peternakan di Kabupaten Gresik Tahun 2017-2021

No	Ternak Besar	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sapi Potong	54.173	57.281	-	58.772	59.259
2	Sapi Perah	505	527	-	532	499
3	Kerbau	229	234	-	234	234
4	Kuda	239	239	-	239	239
5	Kambing	73.546	76.839	-	77.741	79.059
6	Domba	34.343	35.748	-	37.271	37.899
7	Ayam Buras	712.294	726.626	-	745.040	759.629
8	Ayam Petelur	184.620	188.394	-	252.200	260.140
9	Ayam Pedaging	4.097.865	16.715.708	-	23.612.357	6.039.142
10	Itik	31.076	31.890	-	33.264	31.890
11	Entok	31.647	32.197	-	32.525	32.081

Sumber : Kabupaten Gresik Dalam Angka 2018-2022



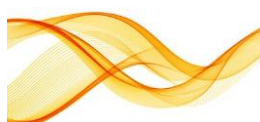


Gambar 2. 6 Grafik Populasi Hewan Ternak Tahun 2017-2021

Tabel 2. 6 Data Pertumbuhan Produksi Hasil Peternakan di Kabupaten Gresik Tahun 2019-2020

No	Jenis Ternak	Produksi Daging (kg)		Pertumbuhan (%)
		2019	2020	
1	Sapi Potong	2.748.340	2.271.086	(17)
2	Domba	116.875	118.560	1
3	Kambing	867.663	882.750	2
4	Ayam Buras	1.320.000	1.330.000	1
5	Ayam Ras Pedaging	4.161.900	5.760.000	38
6	Ayam Ras Petelur	491.524	374.000	(24)
7	Itik	260.715	131.100	(50)
8	Puyuh	14	30	
9	Burung dara	61	162	
10	Babi	3.443	3443	
Total Produksi Daging		9.970.535	11.001.180	

No	Jenis Ternak	Produksi Telur (kg)		Pertumbuhan (%)
		2019	2020	
1	Ayam Buras	419.048	385.891	(8)
2	Ayam Ras Petelur	1.945.498	2.458.131	26
3	Burung Puyuh	12.390	12.395	0
4	Itik	230.497	230.068	(0)
5	Entok	19.534	19.514	(0)
Total Produksi Telur		2.626.967	3.105.999	



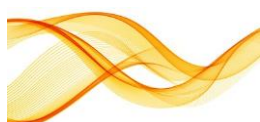
No	Jenis Ternak	Produksi Susu (kg)		Pertumbuhan (%)
		2019	2020	
1	Sapi Perah	1.026.625	1.035.900	1
Total Produksi Susu		1.026.625	1.035.900	

Sumber : Profil Dinas Pertanian, 2020

Berdasarkan populasinya, komoditas utama untuk hewan ternak adalah ayam pedaging, ayam buras, kambing, dan sapi potong . Populasi hewan ternak mengalami peningkatan dari tahun 2017-2021. Populasi ayam pedaging pada tahun 2017 sebesar 4.097.865 ekor mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 populasi ayam pedaging menjadi 6.039.142 ekor. Untuk populasi ayam buras, pada tahun 2017 sebesar 712.294 ekor mengalami peningkatan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 menjadi 759.629 ekor. Populasi kambing pada tahun 2017 sebesar 73.546 ekor mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 populasi kambing menjadi 79.059 ekor. Populasi sapi potong pada tahun 2017 sebesar 54.173 ekor mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 populasi sapi potong menjadi 59.259 ekor.

Berdasarkan data dari dinas pertanian tahun 2021, produksi hasil peternakan tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan baik dari produksi daging, produksi telur, hingga produksi susu. Pada Tahun 2019, produksi daging sebesar 9.970.535 kg dan mengalami peningkatan mencapai 11.001.180 kg pada tahun 2020. Untuk produksi telur, pada tahun 2019 sebesar 2.626.967 kg dan mengalami peningkatan mencapai 3.105.999 kg pada tahun 2020. Untuk produksi susu, pada tahun 2019 sebesar 1.026.625 kg dan mengalami peningkatan mencapai 1.035.900 kg pada tahun 2020.

Selanjutnya adalah gambaran produksi perikanan di Kabupaten Gresik. Ditunjukkan dengan data produksi perikanan budidaya, produksi ikan menurut jenisnya dan tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Gresik.



Tabel 2. 7 Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun					2021
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton	18,786.01	19,221.00	23,458.45	22,450.50	10,553.77	11,458,526
2	Jumlah Nilai Produksi Perikanan Tangkap	juta rupiah	237,380.59	528,189.88	397,234.24	439,714.53	202,761.56	284,109,13
3	Jumlah Jenis Penangkapan	jenis	42	42	42	42	42	42
4	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum	ton	442.55	510	821.47	1,055.76	561.600	589.200
5	Jumlah Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum	juta rupiah	6,807.10	7,809.08	8,579.11	22,916.93	16,154.70	16,948,653
6	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton	89,233.41	102,114	129,214	141,119.32	138,579.34	142,746026
7	Jumlah Nilai Produksi Perikanan Budidaya	juta rupiah	1,991,058.56	1,395,800.13	2,460,086.22	2,564,279.89	2,549,295.68	3,274,293,08
8	Jumlah Jenis Budidaya	jenis	8	8	8	8	8	8
9	Luasan kawasan Konsevasi yang direhabilitasi	Ha	31.00	35.60	53.60	11.95	77.00	75.48

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, 2021

Tabel 2. 8 Perkembangan Hasil Laut Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
a.	Produksi							
	▪ Garam	Ton	4,500.00	4,716.00	5,944.00	11,564.90	2,600.00	1.545
	▪ Rajungan	Ton	250.3	351.42	320.04	164.32	70.35	96.1
	▪ Kepiting	Ton	152.55	226.2	224.91	92.72	75.52	144.6
	▪ Kerang	Ton	7,949.00	8,055.70	8,162.00	9,924.62	695.28	1.139.1
	▪ Ikan Krapu	Ton	460.6	279.31	157.09	131,381.42	53.77	283.615
	▪ Tuna	Ton	-	-	-	-	-	
	▪ Udang	Ton	2,514.98	2,435.48	1,410.08	1,371.29	352.17	669.32
	▪ Kakap Merah	Ton	252.01	244.34	253.72	167.64	49.14	818.076
	▪ Lainnya	Ton	15,155.57	15,463.76	19,446.54	17,436.26	9,819.14	6.928.79
b.	Volume Ekspor							
	▪ Udang	Ton	-	-	-	-	-	-
c.	Nilai Ekspor							
	▪ Udang	Juta	-	-	-	-	-	-
d.	Industri Pengolahan							
	▪ Garam	Unit	3	3	3	3	4	5

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, 2021

Tabel 2. 9 Perkembangan Perikanan Darat di Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun					2021
			2016	2017	2018	2019	2020	
a.	Tambak							
	1. Luas Areal	Ha	17,335.02	17,335.02	17,335.02	30,129.00	30,279.00	28.653.27
	2. Jumlah Produksi Udang Windu	Ton	3,679.28	2,610.17	2,623.22	2,643,781	2,557.62	112,169
	3. Jumlah Produksi Udang Vanname	Ton	7,087.64	10,463.95	10,516.27	10,599,493	10,549.84	715,962
	4. Jumlah Produksi Ikan Patin	Ton	9.06	10.14	10.19	10,422	10.54	785
	5. Jumlah Produksi Ikan Bandeng	Ton	75,836.73	87,970.57	88,410.43	89,925,371	87,119.30	90,397,8
	6. Jumlah Produksi Ikan Tambak Lainnya	Ton	4,019.81	2,873.26	2,887.63	37,940.25	3,069.37	12.367
	7. Nilai Produksi Usaha Tambak (Rp.000,-)	Juta	1,805,420.00	2,094,700.10	2,106,200.73	1,585,967,073.4	2,366,890.42	1,569,314,273
b.	Kolam Air Tenang							
	1. Luas Areal	Ha	100.95	100.95	100.95	95.00	80.00	105
	2. Jumlah Produksi Ikan Sidat	Ton	-		-	-	-	-
	3. Jumlah Produksi Ikan Nila	Ton	17.71	37	5,274.26	5,393.41	5301	5,432,2

No	Uraian	Satuan	Tahun					2021
			2016	2017	2018	2019	2020	
	4. Jumlah Produksi Ikan Lele	Ton	155.39	1,153.68	1,159.45	1,193.98	1220	1,215,4
	5. Jumlah Produksi Ikan Gurami	Ton	3.09	2.62	2.63	2.48	2.73	2.491.02
	6. Jumlah Produksi Ikan Tawar Lainnya	Ton	170.9	186.92	251.46	101.99	18,699.	67,610
	7. Nilai Produksi Usaha Kolam Air Tenang (Rp. 1000,-)	Juta	3,827.45	18,750.93	18,959.06	262.72	182,405	919,117
c.	Sawah/Mina padi							
	1. Luas Areal	Ha	14,402.05	14,402.05	14,629.05	14,550.00	12,750.00	14.500
	2. Jumlah Sawah	Petak	-	-	-	-	-	-
	3. Jumlah Produksi Ikan Mas	Ton	1,842.37	2,291.96	2,303.42	2,325.66	2.303.00	2,326,09
	4. Jumlah Produksi Ikan Nila	Ton	2,493.59	5,211.00	5,237.07	5,393.41	5,301	5,432,1
	5. Jumlah Produksi Ikan Hias	Ton			-	-	-	-
	6. Jumlah Produksi Ikan Tawar Lainnya	Ton	12,363.23	15,723.40	15,802.02	17,376.77	18,699.90	15,608.66
	7. Nilai Produksi Usaha Sawah/ Mina Padi	Juta	139,969.85	241,844.71	251,037.24	262,715.97	182.405.26	-
d.	Penangkapan ikan Perairan Umum							



No	Uraian	Satuan	Tahun					2021
			2016	2017	2018	2019	2020	
	1. Luas Areal	Ha	937.69	937.69	937.69	937.69	937.69	937.69
	2. Produksi (Rawa, Danau, Sungai dll)	Ton	442.55	499.65	821.47	602.25	561.6	589.2
	3. Nilai Produksi (Rawa, Danau, Sungai dll)	Juta	6,426.79	7,809.08	12,914	23,953	16,154	4.713.600

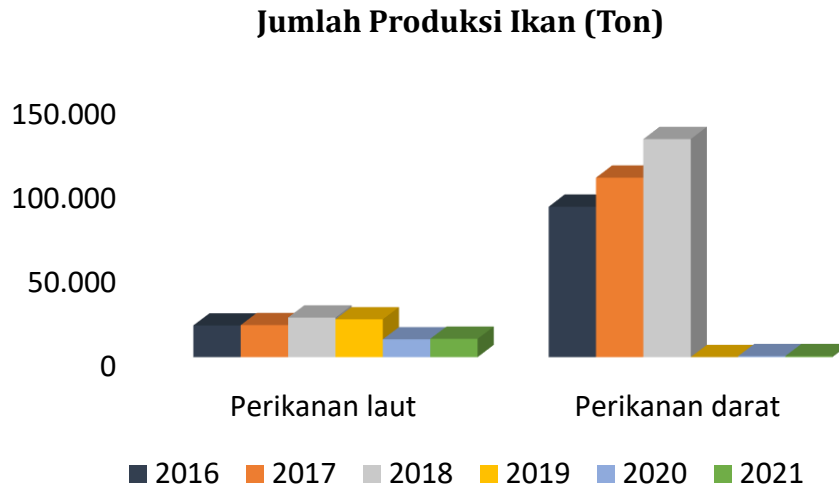
Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, 2021

Tabel 2. 10 Jumlah Produksi Ikan dan Target Daerah Produksi Ikan Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun					2021
			2016	2017	2018	2019	2020	
I.	Jumlah Produksi Ikan							
	1)Perikanan laut	Ton	18,786.01	19,000.51	23,458.45	22,423.47	10,553.77	10.869,33
	2)Perikanan darat	Ton	89,233	106,421	129,214	865.76	561	589
II.	Target Daerah Produksi Ikan							
	1)Perikanan laut	Ton	19,221	19,509	19,802	20,690	21,316.20	10.672
	2)Perikanan darat	Ton	102,114	113,516	126,260	250.50	1,134.30	565

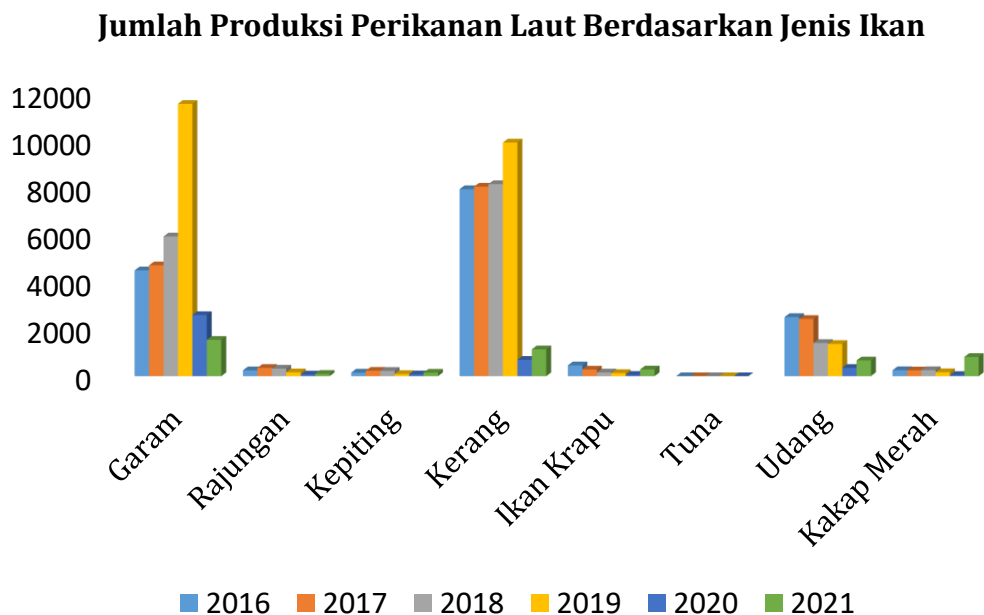
Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, 2021





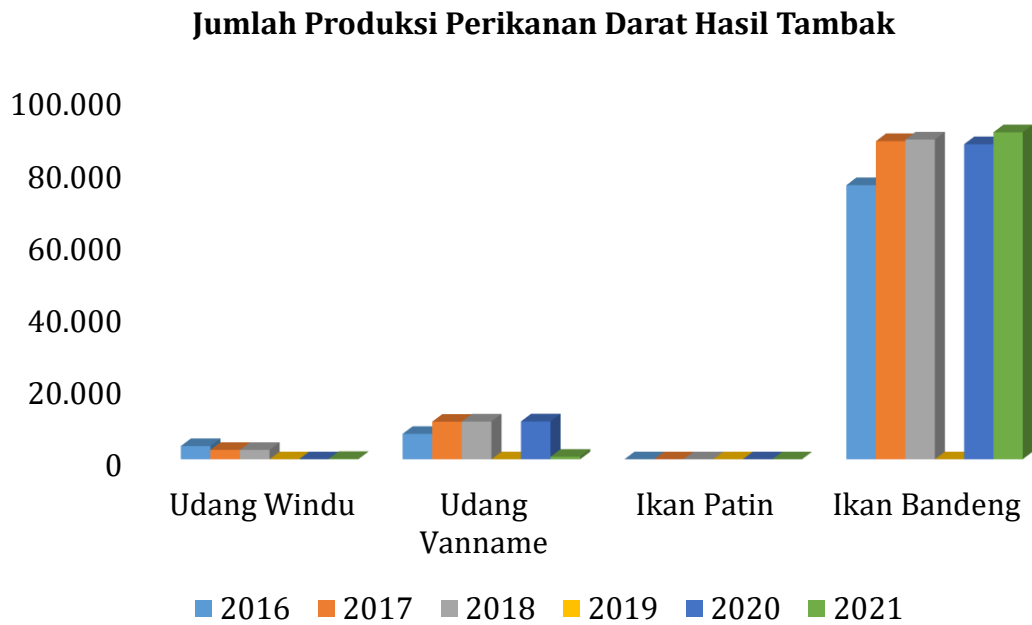
Gambar 2. 7 Grafik Jumlah Produksi Ikan (Ton) Tahun 2016-2021

Berdasarkan jumlah produksi ikan pada tahun 2016-2021, dapat dilihat bahwa produksi ikan dari perikanan laut mengalami penurunan produksi dari tahun 2016 dengan produksi sebesar 18.786,01 ton menurun ditahun 2021 menjadi 10.869,33 ton. Sedangkan untuk produksi perikanan darat mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 89,233 ton, turun menjadi 589 ton di tahun 2021.

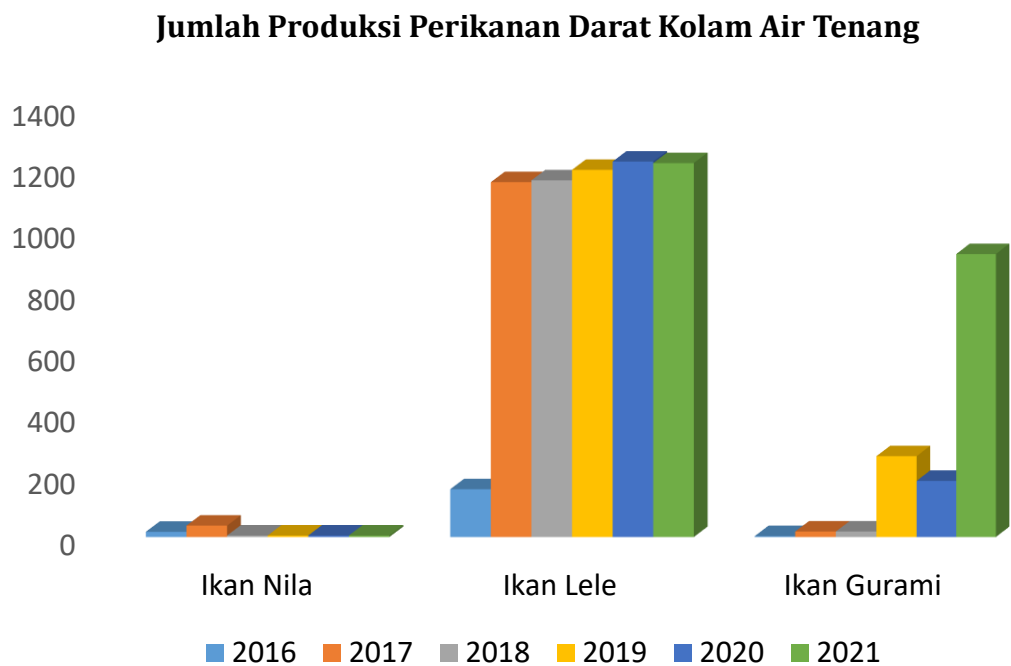


Gambar 2. 8 Grafik Jumlah Produksi Perikanan Darat Berdasarkan Jenis Ikan (Ton) Tahun 2016-2021





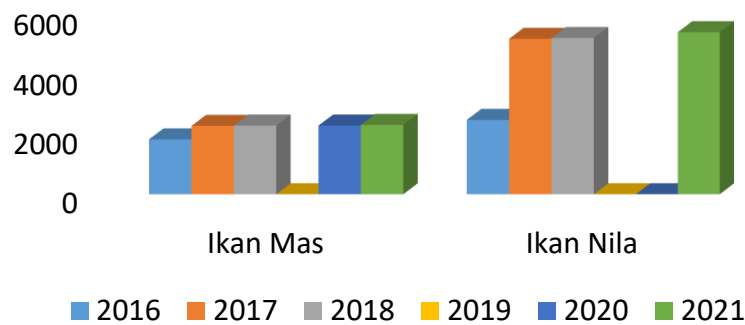
**Gambar 2. 9 Grafik Jumlah Produksi Perikanan Darat Hasil Tambak (Ton)
Tahun 2016-2021**



**Gambar 2. 10 Grafik Jumlah Produksi Perikanan Darat Kolam Air Tenang
(Ton) Tahun 2016-2021**



Jumlah Produksi Perikanan Darat Hasil Mina/Sawah



Gambar 2. 11 Grafik Jumlah Produksi Perikanan Darat Hasil Mina/Sawah (Ton) Tahun 2016-2021

Berdasarkan jenisnya, produksi budidaya perikanan laut yang menjadi unggulan di Kabupaten Gresik adalah komoditas garam dan komoditas kerang. Jumlah produksi komoditas garam pada tahun 2016 sebesar 4.500 ton dan mengalami penurunan produksi pada tahun 2021 sebesar 1.545 ton. Untuk jumlah produksi komoditas kerang pada tahun 2016 sebesar 7.949 ton dan mengalami penurunan produksi pada tahun 2021 sebesar 1.139.1 ton. Produksi budidaya perikanan darat yang menjadi unggulan di Kabupaten Gresik adalah komoditas ikan bandeng, komoditas ikan lele, dan komoditas ikan nila. Jumlah produksi ikan bandeng pada tahun 2016 sebesar 75,836.73 ton dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 90,397,8 ton. Jumlah produksi ikan lele pada tahun 2016 sebesar 155.39 ton dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 1,215,4 ton. Jumlah produksi ikan nila pada tahun 2016 sebesar 2,493.59 ton dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 5,432,1 ton.

Ketersediaan pangan dan produksi pangan memiliki makna yang berbeda, ketersediaan adalah terpenuhinya kebutuhan bahan pangan yang diperoleh dari dari luar produksi sendiri, sedangkan produksi pangan merupakan hasil dari tanah sendiri (Sumarsono, dkk 2017). Menurut FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas). Menghitung ketersediaan pangan dilakukan dengan mengetahui rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih bahan pangan. Berikut merupakan estimasi kebutuhan pangan penduduk Kabupaten Gresik.

Tabel 2. 11 Estimasi Kebutuhan Pangan Penduduk Berdasarkan Data Survey Sosial Ekonomi Nasional Indonesia Tahun 2021

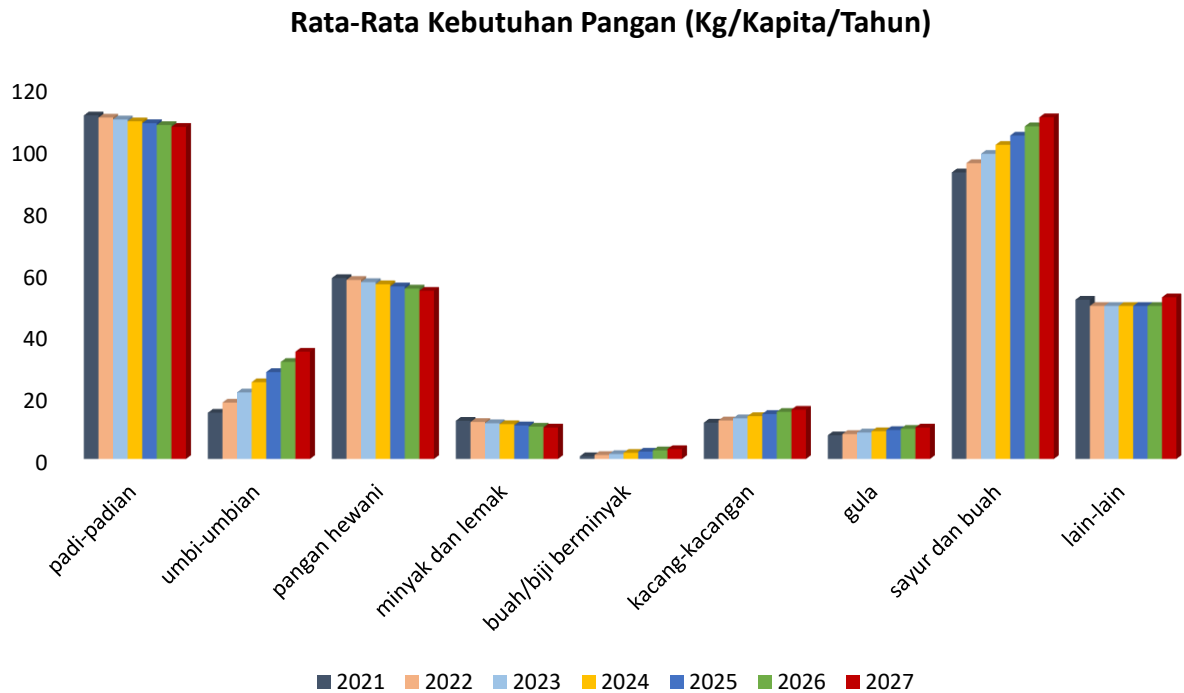
Kelompok/Jenis Pangan	Rata-Rata Kebutuhan Pangan (Kg/Kapita/Tahun)						
	Tahun Dasar 2021	Proyeksi					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Padi-padian							
Beras	89,4	89	88,5	88	87,5	87	86,5
Jagung	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Terigu	20	19,9	19,8	19,7	19,6	19,4	19,3
Subtotal padi-padian	111,1	110,4	109,8	109,2	108,6	108,0	107,4
2. Umbi-umbian							
Singkong	9,6	11,6	13,7	15,8	17,9	20,0	22,1
Ubi jalar	2,9	3,6	4,2	4,9	5,5	6,2	6,8
Kentang	2,4	2,9	3,4	3,9	4,4	4,9	5,5
Sagu	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
Umbi lainnya	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Subtotal umbi-umbian	15	18,3	21,6	24,9	28,2	31,5	34,8
3. Pangan hewani							
Daging ruminansia	5,9	5,8	5,8	5,7	5,6	5,6	5,5
Daging unggas	9,4	9,3	9,2	9,1	9,0	8,9	8,7
Telur	9,1	9,0	8,9	8,7	8,6	8,5	8,4
Susu	3,7	3,7	3,6	3,6	3,5	3,5	3,4
Ikan	30,6	30,2	29,9	29,5	29,1	28,8	28,4
Subtotal pangan hewani	58,6	58,0	57,3	56,6	55,9	55,2	54,5

Kelompok/Jenis Pangan	Rata-Rata Kebutuhan Pangan (Kg/Kapita/Tahun)						
	Tahun Dasar 2021	Proyeksi					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
4. Minyak dan Lemak							
Minyak kelapa	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Minyak lainnya	11,4	11,1	10,7	10,4	10,1	9,7	9,4
Margarin	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Subtotal minyak dan lemak	12,4	12,0	11,6	11,3	10,9	10,5	10,2
5. Buah/biji berminyak							
Kelapa	0,5	0,7	1,0	1,2	1,4	1,7	1,9
Kemiri	0,3	0,5	0,7	0,8	1,0	1,1	1,3
Subtotal buah/biji berminyak	0,9	1,3	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2
6. Kacang-kacangan							
Kacang kedelai	10,4	11,0	11,6	12,3	12,9	13,5	14,1
Kacang tanah	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Kacang hijau	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5
Kacang lain	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9
Subtotal kacang-kacangan	11,8	12,5	13,2	13,9	14,6	15,3	16,0
7. Gula							
Gula pasir	7,6	8,0	8,4	8,8	9,2	9,6	10,0
Gula merah	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Subtotal gula	7,7	8,1	8,6	9,0	9,4	9,8	10,2
8. Sayur dan Buah							
Sayur	53,6	55,3	57,1	58,8	60,5	62,2	63,9

Kelompok/Jenis Pangan	Rata-Rata Kebutuhan Pangan (Kg/Kapita/Tahun)						
	Tahun Dasar 2021	Proyeksi					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Buah	39,1	40,4	41,6	42,9	44,1	45,4	46,6
Subtotal sayur dan buah	92,7	95,7	98,7	101,6	104,6	107,6	110,5
9. Lain-Lain							
Minuman	47,0	45,2	45,2	45,2	45,2	45,2	47,7
Bumbu	4,6	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,7
Subtotal lain-lain	51,6	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	52,4

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, 2021





Gambar 2. 12 Grafik Rata-Rata Kebutuhan Pangan Tahun 2021-2027

Berdasarkan data rata-rata kebutuhan pangan penduduk tahun 2021-2027, dapat diketahui bahwa kebutuhan pangan penduduk Kabupaten Gresik tahun 2021-2027 didominasi oleh padi-padian dan sayur buah. Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk tersebut, perlu adanya ketersediaan produksi dari masing-masing komoditas pangan untuk menghindari terjadinya kelangkaan pangan.

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan utama dalam kemandirian pangan dan kesejahteraan pelaku pertanian, upaya-upaya dalam meningkatkan ketersediaan pangan utama di daerah menjadi sangat penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok penduduk secara langsung dan menjaga stabilitas ekonomi dan pembangunan berkelanjutan secara sistemik. Penyelenggaraan urusan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian pada Tahun 2020 dilakukan oleh Bidang Pangan yang terdiri dari 1 Program dan 3 Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 452.815.000,-. Capaian indikator kinerja urusan pangan pada tahun 2020 dengan sasaran Mencapai Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Pelaku Pertanian serta Target indikator kinerja urusan pangan pada tahun 2020, dapat diuraikan sebagaimana berikut :

Tabel 2. 12 Indikator Urusan Pangan Kab. Gresik Tahun 2020

No	Indikator Sasaran	Realisasi		
		2018	2019	2020
1	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	180.41 kg/kpt/thn	187.55 kg/kpt/thn	180,10 kg/kpt/thn

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2020

Rasio ketersediaan pangan utama dihitung dari rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun dibagi Jumlah penduduk. Rasio ketersediaan pangan utama pada tahun 2018 mencapai 180.41 kg/kpt/thn dan mengalami peningkatan sebesar 7.14% Pada tahun 2019 lalu mengalami penurunan lagi pada tahun 2020 sebesar 180,10 kg/kpt/thn. Capaian ini menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 187,55kg/kpt/tahun. Ketersediaan pangan utama ini mencapai 383.774 Ton mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 388.568,18 Ton sebabkan karena penurunan produktivitas tanaman padi yg disebabkan oleh semakin tinggi nya serangan hama tikus di Kabupaten Gresik.

2.1.2. Kondisi Keterjangkauan Pangan

Keterjangkauan pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup. Aspek keterjangkauan pangan (food accessibility) berkaitan dengan ketersediaan bahan pangan (jumlah, kualitas, ruang dan waktu) harus dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.

A. Angka Konsumsi Energi (AKE) dan Angka Konsumsi Protein (AKP)

Angka Kecukupan Energi (AKE) adalah banyaknya asupan makanan dari seseorang yang seimbang dengan pengeluarannya sesuai dengan susunan dan ukuran tubuh, tingkat kegiatan jasmani dalam keadaan sehat dan mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan secara ekonomis dalam jangka waktu lama. Sedangkan Angka



Kecukupan Protein (AKP) adalah protein makanan paling sedikit yang seimbang dengan hilangnya nitrogen yang dikeluarkan oleh tubuh dalam keseimbangan energi pada tingkat kegiatan jasmani yang dilakukan. AKE, AKP dan angka kecukupan zat gizi lainnya berguna untuk mengukur tingkat konsumsi. Angka Kecukupan Protein (AKP) orang dewasa sebesar 0,75 gr. Protein Senilai Telur (PST) per kilogram berat badan per hari. Kondisi capaian AKE dan AKP Kabupaten Gresik tahun 2021 seperti terlihat pada Tabel 2.13 di bawah ini.

Tabel 2. 13 Pola Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2021

Kelompok/Jenis Pangan	Total Wilayah			
	Kandungan Gizi		Berat Pangan	
	Energi Kkal/Hari	Protein Gram/Hari	Gram per Hari	Kilogram per Tahun
1. Padi-padian				
Beras	811,2	18,6	222,8	81,3
Jagung	5,9	0,2	4,0	1,5
Terigu	356,5	7,2	49,8	18,2
Subtotal padi-padian	1.173,5	26,0	276,6	101,0
2. Umbi-umbian				
Singkong	28,8	0,2	23,8	8,7
Ubi jalar	9,2	0,1	7,3	2,7
Kentang	3,1	0,1	5,9	2,1
Sagu	0,7	0,0	0,2	0,1
Umbi lainnya	0,3	0,0	0,3	0,1
Subtotal umbi-umbian	42,0	0,4	37,4	13,7
3. Pangan hewani				
Daging ruminansia	81,8	4,3	14,7	5,4
Daging unggas	71,2	4,8	23,4	8,5
Telur	31,2	2,5	22,6	8,2
Susu	31,0	1,3	9,2	3,4
Ikan	77,6	12,6	76,1	27,8
Subtotal pangan hewani	292,7	25,5	146,1	53,3
4. Minyak dan Lemak				
Minyak kelapa	7,9	0,0	0,9	0,3
Minyak lainnya	256,4	-	28,4	10,4
Margarin	12,1	0,0	1,5	0,5
Subtotal minyak dan lemak	276,4	0,0	30,8	11,2



Kelompok/Jenis Pangan	Total Wilayah			
	Kandungan Gizi		Berat Pangan	
	Energi Kkal/Hari	Protein Gram/Hari	Gram per Hari	Kilogram per Tahun
5. Buah/biji berminyak				
Kelapa	6,9	0,1	1,3	0,5
Kemiri	5,5	0,2	0,9	0,3
Subtotal buah/biji berminyak	12,4	0,2	2,2	0,8
6. Kacang-kacangan				
Kacang kedelai	57,7	6,0	25,9	9,4
Kacang tanah	4,4	0,2	1,0	0,4
Kacang hijau	1,7	0,1	0,9	0,3
Kacang lain	4,8	0,3	1,6	0,6
Subtotal kacang-kacangan	68,6	6,8	29,4	10,7
7. Gula				
Gula pasir	69,8	0,0	18,9	6,9
Gula merah	1,5	0,0	0,4	0,1
Subtotal gula	71,3	0,0	19,3	7,0
8. Sayur dan Buah				
Sayur	49,6	2,6	133,5	48,7
Buah	49,4	0,5	97,4	35,6
Subtotal sayur dan buah	99,0	3,1	230,9	84,3
9. Lain-Lain				
Minuman	53,6	1,9	117,1	42,7
Bumbu	11,4	0,5	11,4	4,2
Subtotal lain-lain	65,0	2,4	128,5	46,9

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, 2021

Tabel 2. 14 Tingkat Kecukupan Gizi Konsumsi Pangan Penduduk Tahun 2021

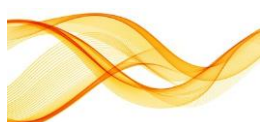
Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Hari			Konsumsi Protein Per Hari		
	Kkal/ Kapita	%	% AKE*)	Gram/ Kapita	%	% AKP**))
1. Padi-padian	1.173,5	55,9	54,6	26,0	40,3	45,6
2. Umbi-umbian	42,0	2,0	2,0	0,4	0,6	0,7
3. Pangan hewani	292,7	13,9	13,6	25,5	39,6	44,7
4. Minyak dan Lemak	276,4	13,2	12,9	0,0	0,1	0,1



Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Hari			Konsumsi Protein Per Hari		
	Kkal/Kapita	%	% AKE*)	Gram/Kapita	%	% AKP**))
5. Buah/biji berminyak	12,4	0,6	0,6	0,2	0,4	0,4
6. Kacang-kacangan	68,6	3,3	3,2	6,8	10,5	11,8
7. Gula	71,3	3,4	3,3	0,0	0,1	0,1
8. Sayur dan Buah	99,0	4,7	4,6	3,1	4,8	5,4
9. Lain-Lain	65,0	3,1	3,0	2,4	3,7	4,2
TOTAL	2.101,0	100,0	97,7	64,4	100,0	113,0

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, 2021

Berdasarkan data terkait tingkat kecukupan gizi konsumsi pangan penduduk tahun 2021, dapat diketahui bahwa angka kecukupan gizi masyarakat Kabupaten Gresik sebesar 2.101 Kkal/Kapita dimana angka tersebut masih dibawah standar nasional yang ditentukan yakni angka kecukupan energi nasional sebesar 2.150 Kkal/Kapita/Hari. Untuk angka konsumsi protein masyarakat Kabupaten Gresik sebesar 64,4 Gram/Kapita dimana angka tersebut sudah melampaui dengan standar nasional yang ditentukan yakni angka kecukupan protein nasional sebesar 57,0 Gram/Kapita/Hari. Untuk proyeksi konsumsi pangan penduduk Tahun 2021-2027 dapat dilihat pada Tabel 2.15 berikut ini.



Tabel 2. 15 Proyeksi Konsumsi Energi Penduduk Berdasarkan Data Survey Sosial Ekonomi Nasional Indonesia Tahun 2021

Kelompok/Jenis Pangan	Rata-Rata Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/Hari)						
	Tahun Dasar 2021	Proyeksi					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Padi-padian							
Beras	811,2	806,7	802,2	797,7	793,2	788,7	784,2
Jagung	5,9	5,8	5,8	5,8	5,7	5,7	5,7
Terigu	356,5	354,5	352,5	350,5	348,6	346,6	344,6
Subtotal padi-padian	1.173,5	1.167,0	1.160,5	1.154,0	1.147,5	1.141,0	1.134,5
2. Umbi-umbian							
Singkong	28,8	35,1	41,4	47,7	54,0	60,4	66,7
Ubi jalar	9,2	11,2	13,2	15,2	17,2	19,2	21,2
Kentang	3,1	3,7	4,4	5,1	5,7	6,4	7,1
Sagu	0,7	0,8	1,0	1,1	1,3	1,4	1,5
Umbi lainnya	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7
Subtotal umbi-umbian	42,0	51,2	60,4	69,6	78,8	88,0	97,2
3. Pangan hewani							
Daging ruminansia	81,8	80,9	79,9	79,0	78,0	77,0	76,1
Daging unggas	71,2	70,4	69,6	68,7	67,9	67,1	66,3
Telur	31,2	30,8	30,4	30,1	29,7	29,4	29,0
Susu	31,0	30,6	30,3	29,9	29,5	29,2	28,8
Ikan	77,6	76,7	75,8	74,9	74,0	73,0	72,1
Subtotal pangan hewani	292,7	289,3	285,9	282,5	279,1	275,7	272,3

Kelompok/Jenis Pangan	Rata-Rata Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/Hari)						
	Tahun Dasar 2021	Proyeksi					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
4. Minyak dan Lemak							
Minyak kelapa	7,9	7,7	7,4	7,2	7,0	6,7	6,5
Minyak lainnya	256,4	248,7	241,1	233,4	225,8	218,1	210,5
Margarin	12,1	11,7	11,4	11,0	10,6	10,3	9,9
Subtotal minyak dan lemak	276,4	268,2	259,9	251,7	243,4	235,2	226,9
5. Buah/biji berminyak							
Kelapa	6,9	10,0	13,0	16,1	19,1	22,2	25,2
Kemiri	5,5	8,0	10,4	12,9	15,3	17,8	20,2
Subtotal buah/biji berminyak	12,4	17,9	23,4	28,9	34,5	40,0	45,5
6. Kacang-kacangan							
Kacang kedelai	57,7	61,2	64,6	68,1	71,6	75,0	78,5
Kacang tanah	4,4	4,7	4,9	5,2	5,4	5,7	6,0
Kacang hijau	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3
Kacang lain	4,8	5,1	5,4	5,7	5,9	6,2	6,5
Subtotal kacang-kacangan	68,6	72,7	76,8	80,9	85,0	89,2	93,3
7. Gula							
Gula pasir	69,8	73,5	77,3	81,0	84,8	88,5	92,3
Gula merah	1,5	1,6	1,7	1,7	1,8	1,9	2,0
Subtotal gula	71,3	75,1	78,9	82,8	86,6	90,4	94,3
8. Sayur dan Buah							
Sayur	49,6	51,2	52,8	54,4	56,0	57,6	59,2



Kelompok/Jenis Pangan	Rata-Rata Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/Hari)						
	Tahun Dasar 2021	Proyeksi					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Buah	49,4	50,9	52,5	54,1	55,7	57,3	58,8
Subtotal sayur dan buah	99,0	102,2	105,3	108,5	111,7	114,9	118,0
9. Lain-Lain							
Minuman	53,6	54,0	54,4	54,8	55,3	55,7	56,1
Bumbu	11,4	11,5	11,6	11,7	11,8	11,9	12,0
Subtotal lain-lain	65,0	65,5	66,0	66,5	67,1	67,6	68,1

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, 2021

Tabel 2. 16 Proyeksi Konsumsi Pangan Penduduk Berdasarkan Data Survey Sosial Ekonomi Nasional Indonesia Tahun 2021

Kelompok/Jenis Pangan	Rata-Rata Konsumsi Pangan (Gram/Kapita/Hari)						
	Tahun Dasar 2021	Proyeksi					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Padi-padian							
Beras	222,8	221,5	220,3	219,1	217,8	216,6	215,4
Jagung	4,0	4,0	4,0	4,0	3,9	3,9	3,9
Terigu	49,8	49,5	49,5	49,0	48,7	48,4	48,2
Subtotal padi-padian	276,6	275,1	273,5	272,0	270,5	269,0	267,4
2. Umbi-umbian							
Singkong	23,8	29,0	34,2	39,4	44,6	49,8	55,0

Kelompok/Jenis Pangan	Rata-Rata Konsumsi Pangan (Gram/Kapita/Hari)						
	Tahun Dasar 2021	Proyeksi					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ubi jalar	7,3	8,9	10,5	12,1	13,7	15,3	16,9
Kentang	5,9	7,2	8,5	9,7	11,0	12,3	13,6
Sagu	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5
Umbi lainnya	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6
Subtotal umbi-umbian	37,4	45,6	53,8	62,0	70,2	78,4	86,6
3. Pangan hewani							
Daging ruminansia	14,7	14,6	14,4	14,2	14,0	13,9	13,7
Daging unggas	23,4	23,1	22,9	22,6	22,3	22,1	21,8
Telur	22,6	22,3	22,1	21,8	21,5	21,3	21,0
Susu	9,2	9,1	9,0	8,9	8,8	8,7	8,6
Ikan	76,1	75,2	74,3	73,5	72,6	71,7	70,8
Subtotal pangan hewani	146,1	144,4	142,7	141,0	139,3	137,6	135,9
4. Minyak dan Lemak							
Minyak kelapa	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7
Minyak lainnya	28,4	27,6	26,7	25,9	25,0	24,2	23,3
Margarin	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2
Subtotal minyak dan lemak	30,8	29,9	29,0	28,0	27,1	26,2	25,3
5. Buah/biji berminyak							
Kelapa	1,3	1,9	2,4	3,0	3,6	4,2	4,7
Kemiri	0,9	1,3	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2
Subtotal buah/biji berminyak	2,2	3,1	4,1	5,0	6,0	6,9	7,9



Kelompok/Jenis Pangan	Rata-Rata Konsumsi Pangan (Gram/Kapita/Hari)						
	Tahun Dasar 2021	Proyeksi					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
6. Kacang-kacangan							
Kacang kedelai	25,9	27,4	29,0	30,5	32,1	33,6	35,2
Kacang tanah	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3	1,3
Kacang hijau	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3
Kacang lain	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2
Subtotal kacang-kacangan	29,4	31,1	32,9	34,7	36,4	38,2	39,9
7. Gula							
Gula pasir	18,9	19,9	20,9	21,9	22,9	23,9	24,9
Gula merah	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Subtotal gula	19,3	20,3	21,3	22,4	23,4	24,4	25,5
8. Sayur dan Buah							
Sayur	133,5	137,8	142,1	146,4	150,6	154,9	159,2
Buah	97,4	100,5	103,6	106,8	109,9	113,0	116,1
Subtotal sayur dan buah	230,9	238,3	245,7	253,1	260,5	267,9	275,3
9. Lain-Lain							
Minuman	117,1	112,6	112,6	112,6	112,6	112,6	118,9
Bumbu	11,4	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,6
Subtotal lain-lain	128,5	123,6	123,6	123,6	123,6	123,6	130,5

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, 2021

B. Kondisi Kemiskinan

Menurut BPS (2016) kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dengan pengeluaran. Kemiskinan selalu berhubungan dengan ketimpangan, dan kerentanan karena orang yang tidak dianggap miskin bisa saja sewaktu-waktu menjadi miskin jika mengalami permasalahan misalkan krisis finansial, dan penurunan harga usaha pertanian. Kerentanan merupakan sebuah dimensi pokok kesejahteraan karena hal tersebut mempengaruhi tingkah laku setiap individu dalam hal investasi, pola produksi dan strategi yang sesuai serta persepsi tentang situasi masing-masing (Haughton dan Shahidur, 2012).

Kemiskinan diukur menggunakan Garis kemiskinan yang terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM), dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran yang dihasilkan dari nilai kebutuhan minimum makanan yang dihitung dalam 2.100 kkalori/perkapita/per hari, sedangkan garis kemiskinan non makanan dihitung dari kebutuhan minimum untuk sandang, pendidikan, dan kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Ukuran kemiskinan yang lain selain angka kemiskinan adalah:

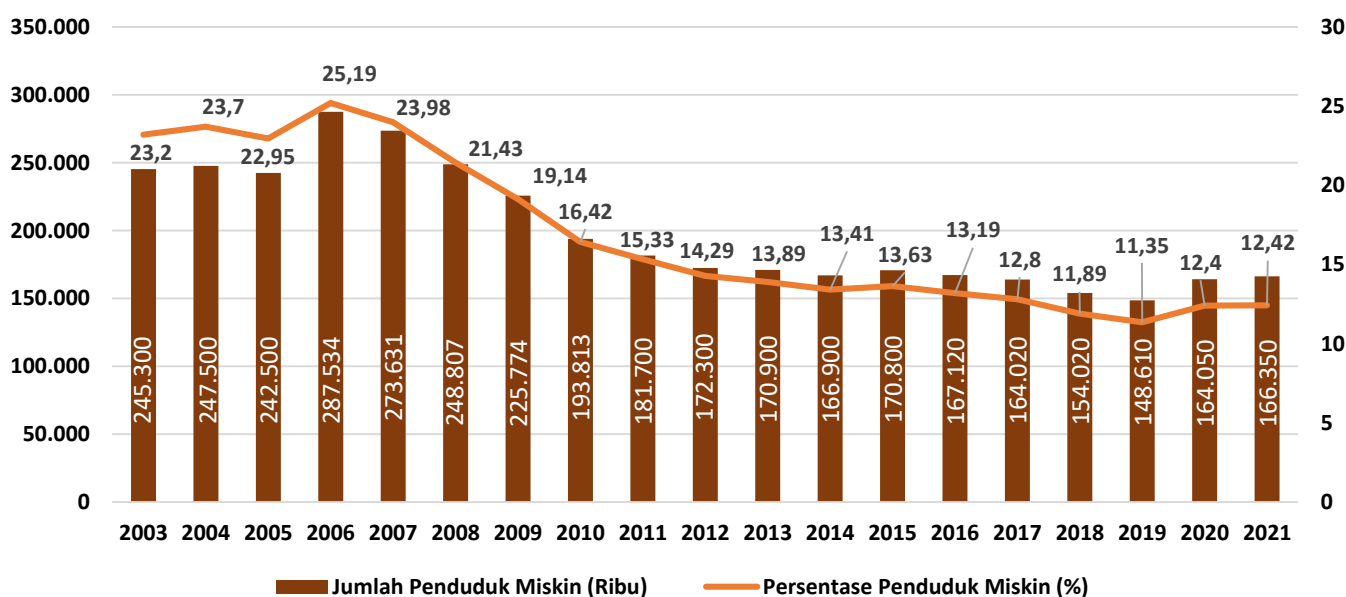
- a. Indeks Kedalaman Kemiskinan (p1) adalah ukuran pengeluaran penduduk miskin terhadap kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk terhadap garis Kemiskinan.
- b. Indeks Keparahan Kemiskinan (p2) adalah ukuran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi pula pengeluaran penduduk miskin.

Fenomena kemiskinan Kabupaten Gresik merupakan permasalahan pembangunan yang massif meninjau posisi Kabupaten Gresik sebagai hinterland kawasan Surabaya Metropolitan Areal dengan perkembangan perekonomian dan teknologi informasi yang pesat serta bertolak belakang dengan capaian positif di sektor lainnya seperti kinerja pertumbuhan perekonomian yang selalu di atas Jawa Timur dan Nasional, gini ratio dengan ketimpangan rendah, kualitas pembangunan manusia di atas rerata nasional, bahkan Kabupaten Gresik merupakan tujuan investasi dengan proporsi realisasi terbesar di Jawa timur baik Penanaman Modal Asing (PMA)



maupun Penanaman Dalam Negeri (PMA). Kemiskinan di Kabupaten Gresik merupakan kantong kemiskinan dalam pembangunan Kota metropolitan yang digerakkan dengan industri manufaktur.

Perkembangan pembangunan di berbagai dimensi tersebut ternyata tidak diiringi dengan pengentasan kemiskinan Kabupaten Gresik yang selama ini masih di atas rerata nasional dan Jawa Timur. Sejak diukur pada tahun 2003, kemiskinan Kabupaten Gresik mengalami puncak kenaikan pada tahun 2006 dengan tingkat kemiskinan mencapai 25,19% atau seperempat penduduk Gresik hidup di bawah garis kemiskinan. Sejak Tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 atau selama 5 (lima) tahun, kemiskinan Kabupaten Gresik mengalami penurunan yang massif sebesar 8,77% dari 25,19% menuju 16,42%. Laju penurunan kemiskinan Gresik mencapai 2,19% per tahun. Pada periode pemerintahan 2010 s.d. 2015, penurunan kemiskinan Kabupaten Gresik terus menunjukkan penurunan secara konsiten namun dengan nilai yang minor cenderung stagnan. Selama 5 (lima) tahun penurunan kemiskinan Kabupaten Gresik sejak Tahun 2010 s.d. 2014 hanya mengentaskan 3,01% atau 0,6% per tahun bahkan tahun 2015 mengalami peningkatan untuk pertama kalinya sebesar 0,22% atau terdapat 3.900 jiwa penduduk miskin baru pada tahun tersebut. Pada periode 2015-2021, penurunan kemiskinan Kabupaten Gresik hanya mengentaskan 1,21% atau 0,172% per tahun.



Gambar 2. 13 Grafik Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2003-2021

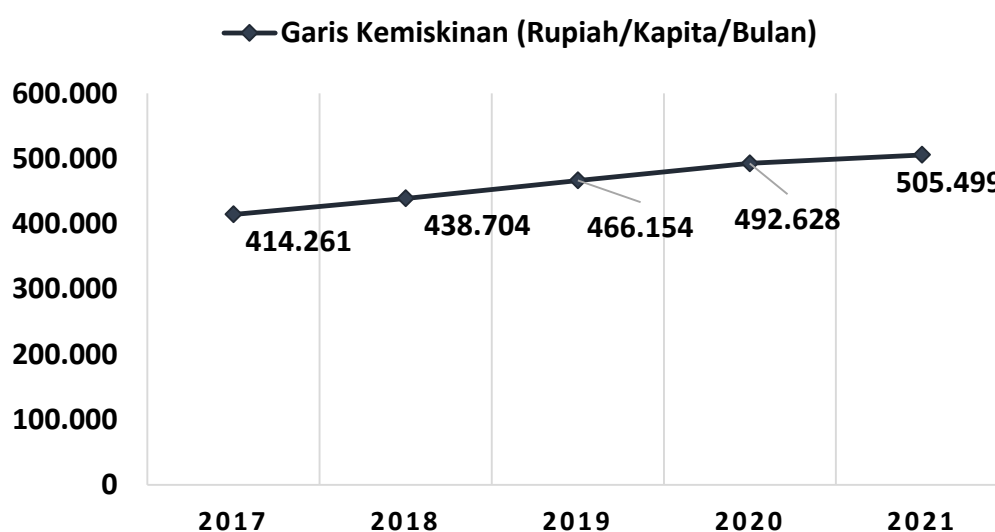
Selama tahun 2011-2021, jumlah penduduk miskin Gresik berkurang sebanyak 15.350 jiwa atau mengalami pengurangan sebesar 1.535 jiwa per tahun. Dalam 5 tahun terakhir pada tahun 2017-2021, dimana kedua tahun awal dan akhir perbandingan mengalami peningkatan, pengurangan jumlah penduduk miskin hanya mencapai 2.330 jiwa atau mengalami pengurangan sebesar 466 jiwa per tahun. Kinerja pengentasan selama 5 (lima) tahun terakhir 5 (lima) kali lebih rendah dibandingkan kinerja pengentasan kemiskinan dalam dekade terakhir. Pengentasan kemiskinan di Gresik cenderung mengalami stagnan dengan laju pengentasan yang lambat.

Fluktuasi tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik secara mutlak dipengaruhi besarnya pengeluaran di bawah Garis Kemiskinan sebagai kebutuhan minimal yang layak atau batas minimal pengeluaran “konsumsi” untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan yang bersifat mendasar (pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan). Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan non-pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lainnya.

Kebutuhan minimal yang layak tersebut kemudian dicerminkan kedalam Garis Kemiskinan (GK) yaitu batas minimal pengeluaran “konsumsi” untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan yang bersifat mendasar (pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan). Sedangkan arti kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan makanan merupakan nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan energi minimal sebanyak 2.100 kkal/kapita/hari. Garis Kemiskinan non pangan yaitu nilai rata-rata pengeluaran dalam rupiah dari jenis komoditi dasar non pangan di perkotaan maupun di pedesaan. Dengan menggunakan Garis Kemiskinan ini, dapat diidentifikasi bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.



Garis kemiskinan Kabupaten Gresik selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya yang bermakna bahwa batas minimal untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan selalu meningkat tiap tahunnya. Garis Kemiskinan di Kabupaten Gresik dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Garis kemiskinan menerangkan bahwa besarnya konsumsi perkapita/bulan penduduk miskin di Kabupaten Gresik pada Tahun 2021 maksimal sebesar Rp. 505.499. Selama periode 2017-2021, Garis Kemiskinan naik sebesar Rp. 91.238 (18,24%) yaitu dari Rp.414.261 perkapita pada Tahun 2017 menjadi Rp. 505.499 pada Tahun 2021.

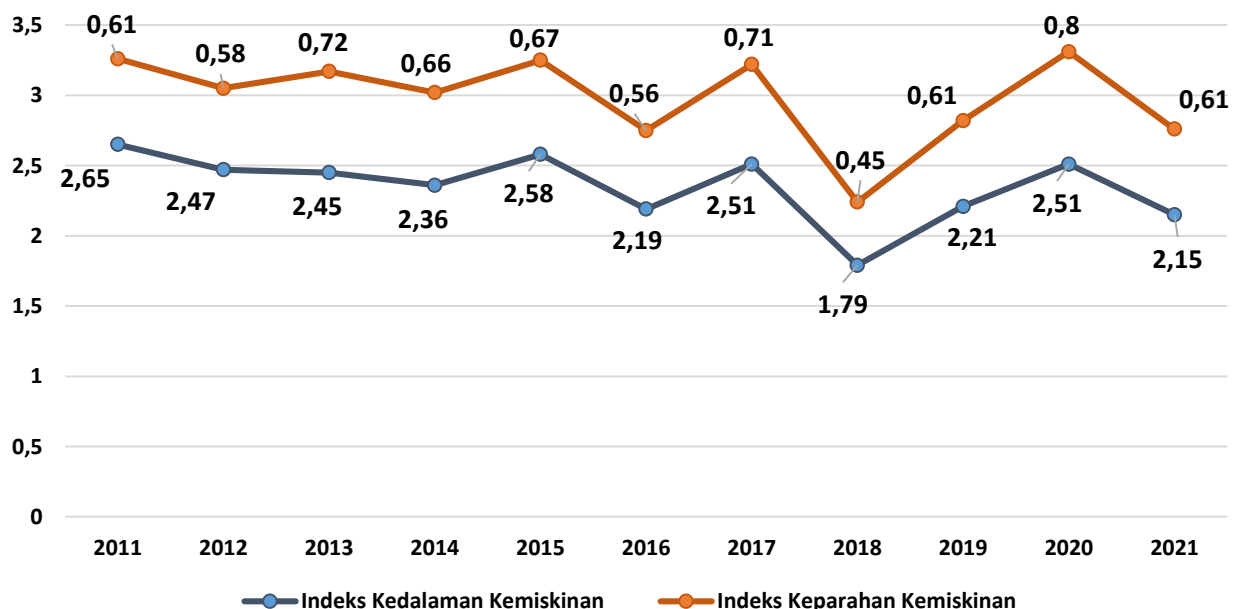


Gambar 2. 14 Grafik Garis Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2017-2021

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Kegunaan P1, nilai agregat dari poverty gap index menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai poverty gap index, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indikator yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai distributionally sensitive index, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Kegunaan P2, memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (poverty gap) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Sejak tahun 2011-2021, kedalaman kemiskinan Gresik mengalami fluktuasi dengan nilai tertinggi pada tahun 2011 sebesar 2,65 dan terendah pada tahun 2021 sebesar 2,15. Kedalaman kemiskinan gagal ditekan hingga mencapai titik terendahnya dan justru mengalami peningkatan pada Tahun 2020. Kedalaman kemiskinan Gresik mengalami penurunan mencapai 2,15 atau berkurang 0,36 poin tahun sebelumnya. Kondisi ini ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.



Gambar 2. 15 Grafik Perkembangan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kabupaten Gresik Tahun 2011-2021



Perkembangan keparahan kemiskinan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir menunjukkan rata-rata nilai indeks yang rendah. Sejak titik tertinggi pada Tahun 2011 sebesar 0,61, kedalaman kemiskinan kembali meningkat pada tahun 2021 setelah selama 10 tahun terakhir selalu berada rentang 0,4-0,65. Keparahen kemiskinan Gresik mengalami fluktuasi dan gagal menekan justru kembali meningkat sejak penurunan tahun 2018 dan menunjukkan tingginya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

C. Kondisi Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil analisa, desa-desa dikelompokkan kedalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (desa) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (desa) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (desa) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (desa) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 1 terdapat di wilayah Kecamatan Dukun (2 desa). Desa rentan kerawanan pangan prioritas 2 terdapat di wilayah Kecamatan Wringinanom (1 desa), Kecamatan Cerme (1 desa), Kecamatan Duduk Sampeyan (2 desa), Kecamatan Bungah (2 desa), Kecamatan Dukun (3 desa), Kecamatan Panceng (1 desa), Kecamatan Sangkapura (4 desa), dan Kecamatan Tambak (1 desa). Desa rentan kerawanan pangan prioritas 3 terdapat di wilayah Kecamatan Wringinanom (4 desa), Kecamatan Driyorejo (2 desa), Kecamatan Kedamean (3 desa), Kecamatan Menganti (1 desa), Kecamatan Benjeng (2 desa), Kecamatan Duduk Sampeyan (5 desa), Kecamatan Kebomas (1 desa), Kecamatan Gresik (1 desa), Kecamatan Manyar (9 desa), Kecamatan Bungah (2 desa), Kecamatan Sidayu (5 desa), Kecamatan Dukun (10 desa), Kecamatan Panceng (6 desa), Kecamatan Ujungpangkah (5 desa), Kecamatan Sangkapura (8 desa), dan Kecamatan Tambak (5 desa).



Desa rentan terhadap kerawanan pangan secara umum disebabkan oleh : (1) Tingkat kesejahteraan penduduk yang masih rendah, (2) Ketersediaan dan adanya akses untuk penggunaan air bersih sehari-hari, (3) Luas lahan perhatian yang tersedia semakin berkurang, dan (4) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk pemenuhan pangan.

D. Kondisi Infrastruktur Jalan

Jalan merupakan penunjang utama mobilitas penduduk dan salah satu faktor penting penunjang ekonomi, sehingga kemantapan infrastruktur jalan merupakan hal yang penting. Kriteria jalan dalam kondisi mantap adalah jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalan diukur dengan menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai IRI) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai RCI). Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan disebutkan bahwa kriteria kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat.

Kewenangan penyelenggaraan jalan berdasarkan SK Bupati Gresik Nomor: 620/503/HK/437.12/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang ruas jalan menurut statusnya ialah jalan Kabupaten dimana terdapat 447 ruas jalan Kabupaten dengan total panjang jalan 512,16 km. Pada tahun 2020 terdapat peningkatan status pada 20 ruas jalan di Kabupaten Gresik, dari status Jalan Poros Desa menjadi Jalan Kabupaten sehingga total panjang jalan menjadi 578,27 km. Saat ini bidang Bina Marga melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik sedang menyusun ulang SK Bupati Gresik terbaru untuk status jalan yang sudah dilakukan updating.

Tabel 2. 17 Kondisi Jalan Kabupaten Gresik Tahun 2021

Total Panjang Jalan		512,16 km
Kondisi Baik	248,517 km	55,55 %
Kondisi Sedang	93,508 km	18,26 %
Kondisi Rusak Ringan	125,34 km	24,47 %
Kondisi Rusak Berat	8,80 km	1,72 %

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gresik Tahun 2021



Panjang jalan sesuai SK Bupati Gresik yaitu 512,16 KM didominasi oleh jenis perkerasan aspal. Jalan Kabupaten sepanjang 248,517 km atau sekitar 55,55 % berada dalam kondisi baik dan 93,508 km atau 18,26 % dalam kondisi sedang, Dengan demikian persentase capaian kemantapan infrastruktur jalan sebesar 342,025 km atau 73,81 %, sedangkan jalan dalam keadaan rusak ringan yaitu sebesar 24,47 % dan rusak berat sebesar 1,72 %. Jika dibandingkan dengan provinsi dan Nasional, diketahui bahwa capaian Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap masih berada dibawahnya.

Pengembangan potensi utama di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila adalah berbasis industri. Dalam rangka menunjang pengembangan industri tersebut, beberapa alternatif dan skenario program nasional diarahkan di Kabupaten Gresik diantaranya melalui Peningkatan Jalan Nasional Kolektor Primer Deandles, Peningkatan Jalan Raya Gresik, serta Pembangunan Jalan Tol Ngawi- Bojonegoro-Tuban- Lamongan- Manyar-dan Bunder. Hadirnya JIPE, mendorong sisi utara Jawa Timur berkembang secara signifikan dan terinterkoneksi dengan pusat-pusat pertumbuhan investasi baru dimana ditopang oleh kemudahan akses transportasi dan infrastruktur yang layak dan memadai serta penguatan sistem logistik barang dan jasa.

Sehingga hal ini menjadi komitmen Kepala Daerah untuk terus meningkatkan capaian Persentase kemantapan infrastruktur jalan melalui berbagai program percepatan dan pengalokasian dana pada urusan kebinamargaan demi meningkatkan dan mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik.

E. Kondisi Akses Layak Air Minum

Urusan keciptakarya didukung oleh penyediaan air minum dengan indikator persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Kriteria akses air minum yang aman yakni minimal memenuhi kapasitas kebutuhan 60 liter/orang/hari dengan parameter fisik tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbusa, tidak berasa dan tidak berbau. Salah satu urusan keciptakarya didukung oleh



penyediaan air minum dengan indikator persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih/minum yang aman.

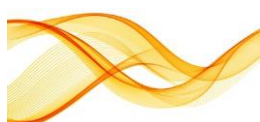
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Indonesia Nomor: 100 tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum merupakan salah satu pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, Kriteria akses air minum yang aman yakni minimal memenuhi kapasitas kebutuhan 60 liter/orang/hari dengan parameter fisik tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbusa, tidak berasa dan tidak berbau. Nilai SPM penyediaan kebutuhan pokok air minum dihitung dengan membandingkan jumlah kumulatif masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui spam (perpipaan) dan bukan perpipaan terhadap jumlah total proyeksi masyarakat pada akhir tahun pencapaian spm. Adapun target akses air minum di Kabupaten Gresik Tahun 2020 sebesar 100 % dengan realisasi tahun 2020 sebesar 66,27 %.

Tabel 2. 18 Persentase Akses Layak Air Minum

	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Gresik	Presentase Akses Layak Air Minum	61,95 %	75,95 %	61,57 %	58,36 %	66,27 %
Jawa Timur	Presentase Capaian Layanan Air Minum	72,06 %	73,44 %	75,20 %	77,67 %	95,56 %

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gresik Tahun 2021

Persentase Capaian Akses Air Bersih/Minum di Kabupaten Gresik selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Persentase akses air bersih/minum di tahun 2016 sebesar 61,95 % mengalami kenaikan sebesar 14 % di tahun 2017 menjadi 75,95%. Kemudian mengalami penurunan yang cukup drastis sampai pada angka 58,36% di tahun 2019, dan beranjak naik di tahun 2020 menjadi 66,27 %. Capaian akses air bersih/minum di Kabupaten Gresik masih lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Timur dimana persentase 66,27% diperoleh dari 44,59 % adalah jaringan perpipaan dan 21,68 % non perpipaan. Hasil yang didapat untuk persentase ini masih dibawah dari target RPJMN yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu sebesar 100 % layak dan 15 % aman.



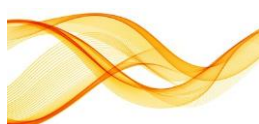
Hal ini dikarenakan terdapatnya beberapa kendala permasalahan yaitu permasalahan pada aspek teknis, Pada aspek teknis masalah yang timbul dikarenakan kapasitas jaringan distribusi yang ada masih terbatas dibanding kebutuhan masyarakat, sistem pengaliran pada daerah pelayanan masih ada yang tidak terlayani 24 jam, dan terdapat daerah pelayanan yang sudah tidak dapat dijangkau oleh pengaliran yang ada sehingga menyebabkan persentase cakupan pelayanan air minum yang naik turun di Kabupaten Gresik.

Penyediaan layanan air minum di Kabupaten Gresik dibagi menjadi 3 wilayah pelayanan, yang meliputi Gresik Utara, Gresik perkotaan dan Gresik Selatan, sumber air baku untuk Gresik utara berasal dari intake Bendung Gerak Sembayat (BGS) dengan kapasitas layanan 200 Liter/detik, Gresik perkotaan melalui SPAM regional umbulan dengan kapasitas terbesar yakni 1.000 liter/detik yang meliputi wilayah pelayanan Kecamatan Gresik, Kebomas sampai dengan Duduksampeyan dan Gresik Selatan melalui SPAM Legundi.

Strategi untuk mencapai target capaian 100% di Kabupaten Gresik yakni melalui skema 55% PDAM, 40% HIPPAM dan 5% BJP. Adapun rencana pengembangan HIPPAM dilakukan dengan 3 tahap (2015-2030) meliputi optimalisasi dan pendirian HIPPAM/KPSAM baru, sedangkan untuk BJP dilakukan dengan pembuatan bak-bak penampungan air baru, hidran umum, dan sumur bor pada lokasi rawan air.

F. Kondisi Pengolahan Air Limbah Domestik

Belum maksimalnya capaian kebutuhan pokok air minum berkaitan erat dengan persoalan sanitasi. Sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah domestik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Nilai SPM pengelolaan air limbah permukiman yang memadai diukur dengan menghitung persentase jumlah penduduk yang terlayani dengan tangki septik/MCK Komunal/sistem pengolahan Air Limbah – SPAL Terpusat) pada akhir pencapaian SPM terhadap jumlah total penduduk.



Tabel 2. 19 SPM Akses Sanitasi yang Aman dan Layak

Indikator	SPM	Target Kab. Gresik	Capaian Tahun 2020
Persentase Capaian Akses Sanitasi yang aman dan layak	90 % akses layak, dan 15 % aman	80 %	65,72 %

Sumber : Review RAD-AMPL Kab Gresik, 2020

Tabel 2. 20 Persentase Capaian Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Indikator	Target Kab. Gresik	Capaian Tahun 2020
Persentase Capaian Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	80 %	65,72 %

Sumber : RAD AMPL Kabupaten Gresik, 2020

Adapun target pencapaian persentase pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik tahun 2020 sebesar 80% dengan realisasi capaian di tahun 2020 sebesar 65,72 % dan masih dibawah target RPJMN yang ditetapkan yaitu 90% layak dan 15% Akses Aman.

Permasalahan yang dihadapi terkait masih rendahnya capaian pelayanan pengolahan air limbah domestik ialah masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap PHBS serta belum adanya kelembagaan pengelola yang memadai untuk air limbah domestik. Kabupaten Gresik saat ini sudah memiliki 134 Unit IPAL dan 1 buah IPLT yang dibangun di tahun 2014 yaitu IPLT Betoयोगuci yang berlokasi di Kecamatan Manyar dengan kapasitas design 45 m³/hari.

2.1.3. Kondisi Pemanfaatan Pangan

Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan. Tujuan dari



PPH adalah untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk, yang mempertimbangkan keseimbangan gizi (nutritional balance) berdasarkan: cita rasa (palatability), daya cerna (digestibility), daya terima masyarakat (acceptability), kuantitas dan kemampuan daya beli (affordability).

Pemanfaatan pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional. Food and Agriculture Organization (FAO) berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menambahkan komponen keempat, yaitu kestabilan dari ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu yang panjang. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak. Jadi Pemanfaatan pangan berhubungan dengan kesehatan masyarakat dan status gizi.



Tabel 2. 21 Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Tahun 2021

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/ Kapita/ Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/ Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-Padian	276,6	1.174	55,9	54,6	0,5	27,9	27,3	25,0	25,0
2	Umbi-Umbian	37,4	42	2,0	2,0	0,5	1,0	1,0	2,5	1,0
3	Pangan Hewani	146,1	293	13,9	13,6	2,0	27,9	27,2	24,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	30,8	276	13,2	12,9	0,5	6,6	6,4	5,0	5,0
5	Buah/ Biji Berminyak	2,2	12	0,6	0,6	0,5	0,3	0,3	1,0	0,3
6	Kacang-Kacangan	29,4	69	3,3	3,2	2,0	6,5	6,4	10,0	6,4
7	Gula	19,3	71	3,4	3,3	0,5	1,7	1,7	2,5	1,7
8	Sayur dan Buah	230,9	99	4,7	4,6	5,0	23,6	23,0	30,0	23,0
9	Lain-lain	128,5	65	3,1	3,0	-	-	-	-	-
Total		901,2	2.101	100,0	97,7		95,5	93,3	100,0	86,3

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, 2021



Tabel 2. 22 Sasaran Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Tahun 2021-2027

No.	Kelompok Pangan	Skor Pola Pangan Harapan						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Padi-padian	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	1,0	1,1	1,3	1,5	1,6	1,8	1,9
3	Pangan Hewani	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7
6	Kacang-kacangan	6,4	6,8	7,1	7,5	7,9	8,3	8,7
7	Gula	1,7	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2
8	Sayur dan Buah	23,0	23,8	24,5	25,2	26,0	26,7	27,4
9	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-
Total		86,3	87,8	89,2	90,7	92,1	93,6	95,0

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, 2021

Berdasarkan pada gambar di atas menunjukkan bahwa skor PPH konsumsi terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 skor PPH konsumsi.

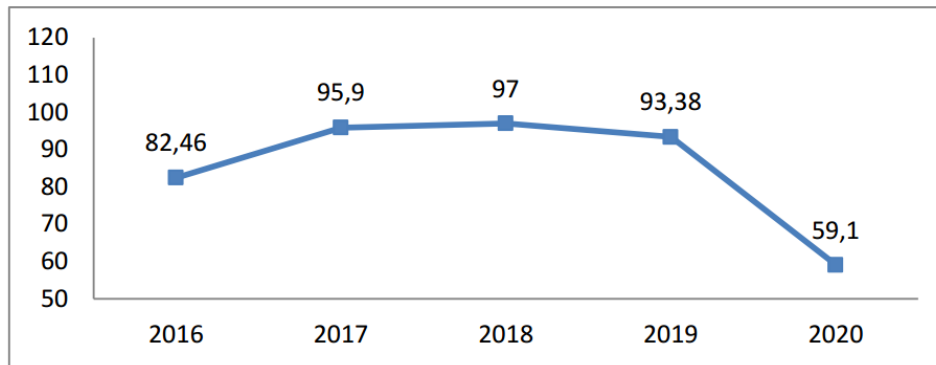
Gizi dapat diartikan sebagai pasokan bahan makanan yang dibutuhkan oleh organisme dan sel untuk tetap hidup. Menurut Ida Purnomowati, Diana H, Cahyo (2008) bahwa gizi merupakan zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk membantu proses pertumbuhan, mempertahankan dan memperbaiki jaringan yang ada di tubuh, mengatur proses dalam tubuh, dan menyediakan energi guna untuk fungsi tubuh. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh yaitu jenis kelamin, umur dan status Kesehatan.

Gizi mempunyai keterkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa. Gizi sebagai sentra untuk pembangunan manusia. Seseorang yang hidup didukung dengan gizi yang cukup sesuai kebutuhan akan tumbuh dan berkembang secara optimal dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas (fisik yang sehat, cerdas, kreatif, produktivitas tinggi). Kekurangan gizi pada awal kehidupan berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Hal ini dikarenakan kurang gizi akan menyebabkan kegagalan pertumbuhan, berat badan lahir rendah (BBLR), kecil, pendek, kurus, serta daya tahantubuh yang rendah. Dalam perkembangannya, seorang anak yang kurang gizi akan mengalami hambatan perkembangan kognitif dan kegagalan pendidikan sehingga berakibat pada rendahnya tingkat produktivitas di masa dewasa. Pemberian gizi yang cukup, tubuh akan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sehingga akan terlahir penduduk yang memiliki kualitas yang baik, dan sumber daya manusia yang berkualitas.

Kondisi kinerja gizi Kabupaten Gresik digambarkan dengan Usia Harapan Hidup, jumlah kematian bayi, angka kematian bayi, angka kematian balita prevalensi stunting, persentase gizi, persentase cakupan neonates, persentase pelayanan kesehatan bayi, dan lainnya.

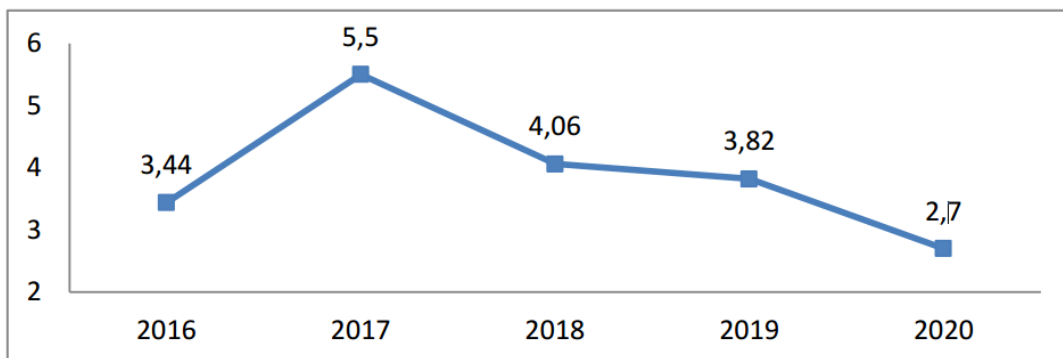
Angka Kematian Ibu (AKI), Angka realisasi kematian Ibu pada tahun 2020 sebesar 59,1/100.000 Kelahiran Hidup. Jumlah absolute kematian Ibu pada tahun 2020 sebanyak 12 kematian ibu dari 20.309 jumlah kelahiran hidup, lebih rendah dari tahun 2019 sebanyak 17 kematian ibu dari 20.388 jumlah kelahiran hidup.





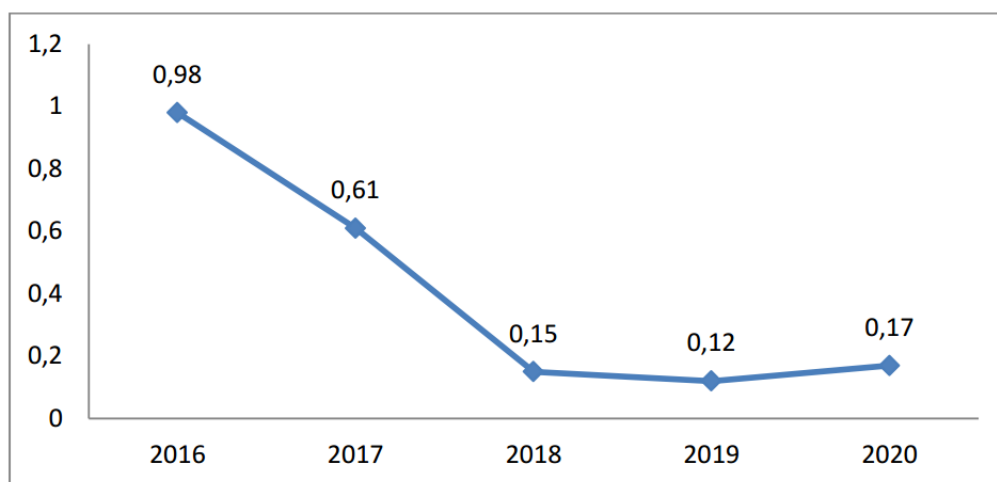
Gambar 2. 16 Trend Realisasi AKI Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020

Angka Kematian Bayi (AKB), Angka realisasi kematian bayi pada tahun 2020 sebesar 2,7/1.000 Kelahiran Hidup. Realisasi tersebut lebih rendah dari tahun 2019 yaitu 3,82/1.000 Kelahiran Hidup. Adapun realisasi yang lebih rendah tersebut menunjukkan bahwa kematian bayi mengalami penurunan dari tahun lalu, dari 78 kematian bayi menurun menjadi 54 kematian bayi.



Gambar 2. 17 Trend Realisasi AKB Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020

Persentase Balita Gizi Buruk, Pada tahun 2020 angka persentase balita gizi buruk mencapai 0.17% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 0.12%. Meskipun jumlah balita gizi buruk tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 95 bayi dari 108 bayi di tahun 2019, dan jumlah balita kurang gizi pada tahun 2020 juga mengalami penurunan menjadi 2.005 bayi dari 3.383 bayi di tahun 2019, namun kenaikan persentase balita gizi buruk ini disebabkan karena jumlah balita pada tahun 2020 adalah 55.383 bayi, lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah bayi pada tahun 2019 yakni sejumlah 94.032 bayi.



Gambar 2. 18 Trend Realisasi Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020

Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya.

Tabel 2. 23 Data Balita Stunting Kabupaten Gresik Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Keluarga	Jumlah Keluarga Beresiko Stunting	Jumlah Balita
Balongpanggang	9.335	6.607	3.187
Benjeng	11.073	7.733	4.124
Bungah	11.493	8.083	4.960
Cerme	14.356	9.911	5.747
Driyorejo	24.248	17.322	6.300
Dudusampeyan	7.512	5.430	3.238
Dukun	11.100	7.731	4.003
Gresik	9.109	7.148	4.611
Kebomas	16.082	11.466	5.767
Kedamean	11.702	7.949	4.014
Manyar	19.885	14.126	6.384
Menganti	25.553	18.295	8.127
Panceng	9.023	6.500	3.227
Sidayu	7.522	5.264	2.945
Ujungpangkah	9.344	6.492	3.439



Kecamatan	Jumlah Keluarga	Jumlah Keluarga Beresiko Stunting	Jumlah Balita
Wringinanom	13.118	8.281	4.702
Tambak	4.126	3.570	1.617
Sangkapura	8.049	7.277	4.271

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Gresik, 2021



Gambar 2. 19 Grafik Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Kabupaten Gresik Tahun 2021

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan pada Tahun 2021 dapat dilihat bahwa Kecamatan Driyorejo dan Kecamatan Menganti merupakan kecamatan dengan jumlah keluarga beresiko stunting di Kabupaten Gresik. Pada tahun 2021, keluarga beresiko stunting di Kecamatan Driyorejo berjumlah 17.322 KK sedangkan di Kecamatan Menganti berjumlah 18.295 KK. Untuk tahun 2022, lokasi khusus penanganan stunting berada di 13 desa. Daftar kecamatan dan desa lokasi khusus penanganan stunting, dapat dilihat pada Tabel 2.24 di bawah ini.



**Tabel 2. 24 Calon Lokasi Khusus Penanganan Stunting Kabupaten Gresik
Tahun 2022**

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Keluarga Beresiko Stunting	Jumlah Anak Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)	% Prevalensi Stunting
Balongpanggang	Pacuh	465	28	12,96
Benjeng	Jogodalu	524	37	15,04
Benjeng	Metatu	576	41	13,36
Cerme	Banjarsari	1007	70	14,29
Cerme	Betiting	991	33	13,98
Cerme	Cerme Kidul	537	66	13,31
Cerme	Cerme Lor	473	38	14,56
Cerme	Gedangkulut	593	60	14,15
Cerme	Ngabetan	776	72	14,31
Cerme	Kandangan	487	27	12,22
Driyorejo	Bambe	1427	86	23,82
Driyorejo	Cangkir	687	44	14,67
Driyorejo	Driyorejo	722	36	12,37
Driyorejo	Gadung	1332	119	19,80
Driyorejo	Kesambenwetan	753	47	18,29
Driyorejo	Mulung	1054	59	16,21
Driyorejo	Petiken	2480	113	15,48
Driyorejo	Randegansari	1223	80	21,11
Driyorejo	Tenaru	512	29	16,96
Driyorejo	Wedoroanom	806	72	24,32
Driyorejo	Banjaran	886	61	15,06
Driyorejo	Karangandong	577	50	17,54
Driyorejo	Mojosarirejo	1699	142	16,59
Driyorejo	Sumput	1633	66	17,28
Driyorejo	Tanjungan	890	61	15,72
Duduksampeyan	Ambeng Ambeng Watangrejo	481	42	17,00
Duduksampeyan	Tambakrejo	502	40	11,80
Dukun	Lowayu	1156	50	12,79
Gresik	Karangturi	580	35	13,94
Gresik	Tlogopojok	532	39	12,19
Kebomas	Gending	492	52	28,57
Kebomas	Indro	646	46	13,90
Kebomas	Sidomoro	817	65	20,50



Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Keluarga Beresiko Stunting	Jumlah Anak Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)	% Prevalensi Stunting
Kebomas	Singosari	955	59	14,86
Kebomas	Kedanyang	1371	70	13,83
Kebomas	Kembangan	1287	124	13,32
Kebomas	Randuagung	1248	202	20,45
Kebomas	Sekarkurung	569	64	22,94
Kebomas	Sidomukti	666	37	17,54
Kedamean	Turirejo	511	37	13,03
Manyar	Banjarsari	636	56	13,18
Manyar	Leran	705	96	22,27
Manyar	Penganden	962	55	14,25
Manyar	Pongangan	1109	119	17,89
Manyar	Roomo	578	30	12,61
Manyar	Suci	3163	31	13,90
Menganti	Boboh	449	26	17,81
Menganti	Randupadangan	587	41	15,24
Sidayu	Golokan	681	95	27,78
Sidayu	Randuboto	484	63	21,88
Wringinanom	Kepuhklagen	464	31	13,03

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Gresik, 2021

2.2. TANTANGAN PANGAN DAN GIZI KABUPATEN GRESIK

Ketahanan pangan memiliki dua kata kunci penting yaitu ketersediaan pangan yang cukup dan merata serta akses penduduk terhadap pangan, baik secara fisik maupun ekonomi. Ketahanan pangan diartikan sebagai tersedianya pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi bagi setiap warga untuk menopang aktivitasnya sehari-hari sepanjang waktu.

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas yang sangat kompetitif di pasar internasional, setiap daerah di Indonesia menghadapi tantangan berat dalam merumuskan kebijakan pangan yang mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Kebijakan pangan yang dimaksud antara lain adalah upaya mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan ragam komoditas pangan dan upaya peningkatan



diversifikasi konsumsi pangan. Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik berkaitan dengan pangan dan gizi antara lain sebagai berikut:

, Tabel 2. 25 Tantangan Pangan Dan Gizi Kabupaten Gresik

No	Tujuan Strategis	Keterangan
1	Aspek Ketersediaan Pangan	1) Perubahan iklim global yang berpengaruh pada ketersediaan dan keterbatasan infrastruktur pendukung akses dan distribusi pangan 2) Minimnya sarana prasarana penunjang ketahanan pangan 3) Semakin tingginya konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian 4) Kurang optimalnya diversifikasi pangan 5) Daya Dukung lahan masih kurang optimal 6) Terdapat alih fungsi tambak akibat tidak adanya perlindungan lahan tambak produktif 7) Sarana dan Prasarana penangkapan ikan kurang memadai sehingga menyebabkan kurang optimalnya hasil tangkapan 8) Belum optimalnya sosialisasi kepada nelayan untuk menerapkan sistem penangkapan atau budidaya yang tidak merusak lingkungan 9) Belum tersedianya data yang memadai karena masih belum optimalnya sistem informasi basis data terutama data saluran tambak 10) Produk pangan segar pertanian belum bersertifikat baik prima tani maupun SNI 11) Insentif untuk pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan 12) Perubahan iklim yang tidak menentu mengakibatkan gangguan produksi 13) Aspek daya saing produk pertanian relative masih rendah 14) Masih terbatasnya RPH modern yang berstandar SNI 15) Kelangkaan Pupuk 16) Ketergantungan Petani pada pupuk Kimia 17) Peserta didik PAUD tidak mendapat pemberian makanan tambahan



No	Tujuan Strategis	Keterangan
		18) Tidak ada kecamatan yang melaksanakan pengembangan pasar, pemantauan, dan stabilisasi harga 19) Tidak ada lumbung pangan yang dikembangkan di daerah rawan pangan 20) Jumlah lumbung pangan belum memenuhi target 21) Tidak terlaksananya pemantauan dan pemantapan panganekaragaman pangan dan keamanan pangan 22) Belum ada cadangan pangan pemerintah 23) Tidak ada desa mandiri pangan 24) Belum ada program sertifikat pangan segar prima
2	Aspek Keterjangkauan Pangan	1) Keterbatasan daya beli masyarakat terhadap pangan 2) Tidak terlaksananya pemantauan dan pemantapan distribusi, harga, dan akses pangan 3) Pangan jajanan anak sekolah tidak ada yang diuji laboratorium 4) Tidak ada sampling dan uji pangan untuk keamanan pangan, mutu dan gizi pangan 5) Tingkat penguasaan teknologi petani masih terbatas ditengah persaingan pasar yang semakin ketat 6) Garis kemiskinan Gresik pada Tahun 2021 sebesar 505.499 Rupiah/Kapita/Bulan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 7) Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,36 dibandingkan dengan Tahun 2020 8) Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami penurunan sebesar 1,9
3	Aspek Pemanfaatan Pangan	1) Belum optimalnya kualitas pelayanan Kesehatan bayi dan balita sehingga berakibat pada: ▪ Belum seluruhnya bayi mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) ▪ Masih adanya bayi lahir dengan Berat Badan Bawah Garis Merah (BBBGM) ▪ Masih adanya bayi lahir dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)



No	Tujuan Strategis	Keterangan
		2) Belum optimalnya upaya penanganan stunting ▪ Belum semua ibu hamil terpenuhi kebutuhan gizinya ▪ Belum seluruh Balita terpenuhi kebutuhan gizinya 3) Pelayanan balita sehat dan balita sakit masih belum terlaksana secara optimal 4) Pelayanan terhadap anak kelas 1-10 (status gizi, gigi, mata dan telinga) masih belum optimal 5) Pergeseran pola konsumsi masyarakat terhadap pangan dari sumber karbohidrat ke non karbohidrat. Menurutnya, pergeseran ini akan berdampak pada kecukupan gizi 6) Perubahan gaya hidup yang terkait dengan pola makan, meliputi kebiasaan makan di luar rumah, konsumsi pangan olahan meningkat, makan tidak seimbang (tinggi minyak/lemak/ gula dan rendah sayur/ buah/ pangan hewani)
4	Aspek Kelembagaan	1) Belum adanya sistem pengendalian dan pengawasan pangan 2) Masih belum optimalnya perlindungan usaha Tani 3) Petugas lapangan pertanian masih belum memiliki peran yang dominan 4) Penetapan lahan LP2B minimal di Kabupaten Gresik kurang melibatkan penyuluh pertanian (Dinas Pertanian) 5) Tidak ada kecamatan yang melaksanakan pengembangan pasar, pemantauan, dan stabilisasi harga 6) Tidak ada kelompok tani yang terlibat pemberdayaan 7) Tidak tersedia tenaga penyuluh keamanan pangan dan pengawas pangan 8) Tidak ada kelompok usaha pangan lahan kering 9) Frekuensi pertemuan Dewan Ketahanan pangan hanya terealisasi pada tahun 2017 – 2018 10) Belum ada penyuluh bersertifikat 11) Belum ada tim pangan kecamatan yang dibina



BAB 3



RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI

3.1. TUJUAN DAN SASARAN PANGAN DAN GIZI

Tujuan utama yang ingin diwujudkan dengan adanya perbaikan pangan dan gizi melalui pendekatan Multi sektor adalah terbentuknya sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, produktif secara berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Tujuan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Gresik meliputi 4 (empat) tujuan strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA);
2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan B2SA;
3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan yang B2SA dan Pelayanan Gizi (Esensial);
4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi.

Tujuan akhir dari pembangunan pangan dan gizi di daerah adalah terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi. Hal ini selaras dengan amanat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 124/M.Ppn/Hk/10/2021 Tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Pangan Dan Gizi Tahun 2021-2024. RAD-PG Kabupaten Gresik disusun untuk mendukung pencapaian target pembangunan pangan dan gizi yang ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Gresik 2021- 2026 sebagai bagian dari pembangunan bidang Pangan dan Gizi.



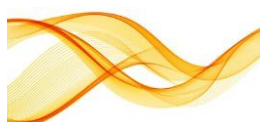
Berdasarkan maksud dan tujuan di atas, maka sasaran yang diharapkan dari Kegiatan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Gresik ini adalah:

- a) Terwujudnya kondisi ketersediaan pangan yang mantap secara mandiri berbasis sumber daya lokal;
- b) Terwujudnya kemudahan dan kemampuan mengakses pangan bagi setiap rumah tangga di seluruh wilayah Kabupaten Gresik;
- c) Meningkatnya kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat menuju gizi seimbang;
- d) Terwujudnya peningkatan mutu dan keamanan pangan bagi masyarakat;
- e) Meningkatnya status gizi masyarakat.

Indikator dan target pembangunan bidang pangan dan gizi dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Gresik dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 Indikator dan Target Pembangunan Bidang Pangan dan Gizi
Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026**

No	Indikator	Baseline 2021	Target 2026
Aspek Kesehatan			
1	Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar	>40 %	>90 %
2	Persentase balita stunting mendapatkan penanganan	21,10 %	15 %
3	Persentase Puskesmas Ramah Anak	-	15 %
4	Tingkat Kematangan Layanan Kesehatan	2	2
5	Persentase Masyarakat miskin yang tercover JKN pada GKS	100 %	79 %
6	Persentase sarana Pengelolaan Makanan Minuman sesuai standar dan berijin	58 %	68 %
7	Persentase peningkatan strata kemandirian posyandu Balita (PURI)	93,8 %	97,50 %
8	Persentase peningkatan strata kemandirian Pos Kesehatan Desa (PURI)	71,5 %	74 %
Aspek Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
1	Persentase Rumah Tangga Akses Air Bersih Non PDAM	13,72 %	23,43 %



No	Indikator	Baseline 2021	Target 2026
2	Prosentase penyediaan pelayanan SPALDT akses aman	53,99 %	59,59 %
3	Presentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik	52,70 %	60,35 %
Aspek Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman			
1	Presentase panjang Jalan lingkungan kawasan kumuh yang ditangani	4,12 %	6,64 %
2	Presentase panjang Saluran lingkungan kawasan kumuh yang ditangani	3,29 %	5,30 %
3	Persentase Rumah Swadaya tidak layak huni yang ditangani	16.59 %	2,49 %
4	Persentase PSU Perumahan di permukiman dalam kondisi baik	71.11 %	0,52 %
5	Persentase PSU Akses Sanitasi di permukiman dalam kondisi baik	99.30 %	0,07 %
Aspek Sosial			
1	Persentase Keluarga Terdaftar DTKS yang mendapatkan Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	35,87 %	45,63 %
Aspek Pangan			
1	Stabilitas Harga Pangan Utama	9,99 %	10 %
2	Kualitas konsumsi Pangan yang diindikasikan oleh skor Pola pangan harapan (PPH)	83 %	88,5 %
3	Prosentase penanganan daerah rawan pangan	10,71 %	16 %
4	Persentase Keamanan Pangan Segar	80 %	81 %
Aspek Lingkungan Hidup			
1	Persentase penurunan beban pencemaran air	40 %	65 %
2	Persentase Penanganan Sampah	50 %	58 %
3	Persentase Pengurangan sampah	9 %	12 %
4	Jumlah TPS dan TPS3R yang terbangun dan terkelola	129	170
5	Jumlah TPA/ TPST yang terbangun dan terkelola	1	4
6	Jumlah bank sampah yang terbentuk	330	410
Aspek Perikanan			
1	Produksi perikanan tangkap (ton)	11.237	12.200
2	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	142.735	165.000
3	Persentase pengawasan usaha perikanan	0	50 %



No	Indikator	Baseline 2021	Target 2026
4	Presentase Produksi Perikanan yang diolah dan dipasarkan	85	88
5	Angka konsumsi ikan	2	1,2
Aspek Pertanian			
1	Prosentase Realisasi Pupuk Bersubsidi	95 %	97,5 %
2	Luas lahan LP2B dan LCP2B yang terlindungi	27721 ha	27721 ha
3	Persentasi Poktan/Gapoktan yang Terasilitasi Infrastruktur Pertanian	31,39 %	38,83 %
4	Persentase kondisi ternak sehat	87,50 %	88,60 %
5	Persentase Usaha Pertanian yang Memiliki Ijin	-	62,50 %
6	Persentase penanganan organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	81,41 %	83,47 %
7	Persentase penyuluh bersertifikat	26,23 %	50,82 %
8	Persentase kelompok tani dengan klasifikasi Madya	11,60 %	18,80 %

Sumber : RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

3.2. RUANG LINGKUP PANGAN DAN GIZI

RAD-PG difokuskan dalam upaya penajaman kontribusi program/kegiatan dalam pencapaian target pembangunan pangan dan gizi yang tertuang di dalam RPJMN 2020-2024 dan dokumen kebijakan lain yang relevan seperti Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi tahun 2020- 2024 serta Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.

Tujuan strategi dan aksi penajaman lebih difokuskan untuk menghadirkan daya ungkit sistem pangan dalam perbaikan konsumsi gizi keluarga yang beragam, seimbang dan aman yang mencakup empat tujuan strategis yaitu: 1) Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman; 2) Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman; 3) Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial); 4) Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi. Pengembangan aksi di setiap strategi dilakukan dengan prinsip menghadirkan intervensi lintas sektor ditingkat keluarga secara konvergensi dan terintegrasi, memegang teguh prinsip no one left behind dengan memberi prioritas kelompok rawan gizi, implementatif, terukur dan berkesinambungan.



Oleh karena itu, dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2021-2024 menitikberatkan pada strategi yang spesifik untuk meningkatkan daya ungkit kebijakan pangan dan gizi yang menjamin keberlangsungan produksi hingga konsumsi di tingkat rumah tangga. Selain itu, fokus kepada kelompok paling rentan segala bentuk malnutrisi (gizi kurang maupun gizi lebih) sangat penting untuk mengatasi ketimpangan. Hal tersebut dapat meningkatkan efektifitas kebijakan dengan penggunaan sumber daya yang efisien terutama dalam kondisi pandemi dan masa transisi pasca pandemi.

3.3. PENGUATAN RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI

Pelaksanaan RAD-PG melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan di setiap Daerah. Pelaksanaan selain dilakukan oleh pemerintah daerah juga melibatkan dunia usaha/swasta, organisasi masyarakat, academia (perguruan tinggi/organisasi profesi), organisasi keagamaan, mitra pembangunan, dan media massa. Pelaksanaan ada yang bersifat oleh salah satu pemangku kepentingan atau bersama-sama. Aspek yang sangat penting diperhatikan dalam pelaksanaan adalah koordinasi dan integrasi. Dalam melakukan pelaksanaan perlu mekanisme kerja, yaitu:

- a. Pertemuan koordinasi perencanaan sebagai awal dari pelaksanaan;
- b. Pertemuan penentuan prioritas baik prioritas daerah, sasaran, maupun jenis kegiatan. Penentuan prioritas daerah juga disinkronisasikan dengan prioritas yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat;
- c. Pertemuan koordinasi untuk membahas tantangan, proses, dan berbagai faktor yang terjadi pada saat pelaksanaan.

Rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah diharapkan mampu mempercepat tercapainya tujuan RPJMN dan RPJMD, sehingga fungsinya tidak hanya sebagai instrumen untuk melakukan koordinasi lintas sektor namun juga berisi rekomendasi kegiatan yang diacu untuk menyusun dokumen perencanaan khususnya di bidang pangan dan gizi. Rekomendasi kegiatan yang dimaksud berisi penajaman aksi (baru) yang tidak lagi mengkompilasi program/kegiatan yang sudah ada pada dokumen perencanaan sebelumnya, dimaksudkan untuk mengisi gap mempercepat tercapainya tujuan RPJMN dan RPJMD.



Lebih detail mengenai perbedaan konsep lama dan konsep baru rencana aksi pangan dan gizi dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Perbedaan Konsep Penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi Saat Ini dengan Periode Sebelumnya

Perbedaan	Konsep Lama	Konsep Baru
Pendekatan Penyusunan Aksi	Dibagi ke dalam 5 pilar rencana aksi pangan dan gizi	Dibagi ke dalam 4 tujuan strategis
Matriks Aksi	Berisi sebagian besar kompilasi kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan yang sudah ada	Berisi penajaman kegiatan dan mengisi gap untuk mempercepat tercapainya tujuan RPJMN dan RPJMD
Tujuan dan Fungsi	Rencana aksi pangan dan gizi sebagai dokumen perencanaan dan instrumen koordinasi lintas sektor	Rencana aksi pangan dan gizi sebagai acuan dan rekomendasi kegiatan untuk menyusun dokumen perencanaan dan tetap sebagai instrumen koordinasi lintas sektor
Aspek Gender	Aksi pangan dan gizi yang responsif gender masih sangat minim	Mempertimbangkan kesetaraan gender sebagai pendekatan penting dalam merumuskan aksi
Aspek Ketahanan	Aksi yang diarahkan untuk penguatan sistem pangan yang sensitif gizi termasuk perlindungan gizi dalam kedaruratan yang masih terbatas.	Aksi tidak hanya diarahkan untuk penguatan sistem pangan yang sensitif gizi, tetapi juga peningkatan ketahanan pangan dan gizi dalam kondisi kegawat daruratan termasuk pandemi COVID-19



3.3.1. Respon Kebijakan Pangan dan Gizi di Daerah Dalam Situasi Darurat

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat bersama sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau. Pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kecukupan gizi pada keluarga miskin dan dalam situasi darurat. Paling tidak dua tanggung jawab pemerintah tersebut tercantum dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjadi dasar kuat agar kebutuhan gizi masyarakat tetap diperhatikan bahkan dalam situasi darurat sekalipun seperti situasi bencana atau pandemi.

Pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi hampir di seluruh negara berdampak ke segala dimensi kehidupan manusia, tidak terkecuali terhadap kebutuhan dasar penduduk antara lain kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya saat himbauan beraktifitas harus dibatasi mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Menanggapi situasi penyebaran COVID-19 yang begitu cepat, Presiden Republik Indonesia telah menyatakan status tanggap darurat pada tanggal 17 Maret 2020 Pemerintah juga menetapkan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden No. 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka percepatan Penanganan COVID-19.

Dengan terjadinya pandemi COVID-19, status tanggap darurat yang diikuti dengan kebijakan PSBB akan berdampak signifikan tidak hanya pada aktivitas masyarakat tetapi juga terhadap kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat yang bekerja pada sektor informal. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap menurunnya akses dan daya beli masyarakat terhadap pemenuhan pangan bergizi. Himbauan pemerintah kepada masyarakat untuk melakukan pekerjaan dari rumah (working for home) dan menjaga jarak secara fisik (social/physical distancing) serta kebijakan beberapa pemerintah daerah yang mengimplementasikan karantina wilayah secara parsial dan melakukan pembatasan kegiatan di keramaian, telah membuat perubahan situasi yang baru di hampir semua aspek kehidupan, termasuk perubahan pola rantai pasok pangan.



Untuk mengantisipasinya Kementerian Pertanian menerbitkan Surat Edaran Menteri Pertanian No. 03/SE/KN.230/M/05/2020 tentang Antisipasi Terjadinya Krisis Pangan dengan memastikan kesiapan percepatan tanam Musim Tanam II (MT II) tahun 2020, memastikan kesiapan cadangan beras dengan berkoordinasi dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di level desa, serta sosialisasi gerakan diversifikasi pangan lokal.

Dari perspektif produksi, para petani dan produsen pangan mulai merasakan perubahan terkait pasokan input dan juga harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Untuk memastikan keamanan pangan olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kemudian mengeluarkan Pedoman Produksi dan Distribusi Pangan Olahan sebagai upaya mendukung pelaku usaha dalam memastikan rantai produksi dan distribusi pangan olahan berkualitas secara konsisten termasuk pada masa status darurat bencana wabah COVID-19 di Indonesia.

Mobilisasi bahan pangan juga telah mengalami beberapa penyesuaian di mana terjadi pola perubahan jalur pasokan yang lebih banyak menuju pasar-pasar modern dan pasar yang berbasis online. Sementara itu dari sisi konsumsi, akibat diterapkannya social/physical distancing atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa wilayah, pola transaksi juga mulai berubah yang ditunjukkan semakin meningkatnya transaksi yang menggunakan platform digital atau online.

Dari perspektif distribusi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan juga sudah menghimbau seluruh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Indonesia melalui Surat No. AJ.303/I/I/DJPD/2020 agar selalu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Asosiasi Perusahaan Logistik setempat untuk menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan logistik bagi masyarakat.

Dari perspektif konsumsi, kerawanan pangan dapat meningkatkan risiko terjadinya masalah gizi akut (gizi kurang dan gizi buruk) pada kelompok rentan, bahkan masalah gizi kronik (stunting) pun mungkin akan meningkat jika penetapan tanggap darurat COVID-19 berlangsung dalam waktu yang cukup lama (prolonged emergency situation). Pelayanan gizi diharapkan dapat tetap berjalan dengan melakukan beberapa penyesuaian terkait kebijakan pembatasan sosial yang diatur oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 guna



meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat dengan memprioritaskan kelompok rawan, yaitu bayi dan balita, remaja putri, ibu hamil dan ibu menyusui pada situasi pandemi COVID-19. Kondisi kedaruratan di berbagai daerah berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Beberapa daerah telah melakukan PSBB atau pembatasan karena terdapat transmisi lokal. Sementara itu, beberapa daerah yang belum menerapkan PSBB, belum ada transmisi lokal virus COVID-19 serta mobilisasi penduduk antar wilayah yang sangat minimal, mereka tetap mematuhi prinsip pencegahan infeksi dan physical distancing.

Untuk daerah yang memiliki kebijakan PSBB atau terdapat transmisi lokal, walau terjadi pembatasan pelayanan, perlu dipastikan bahwa ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita, akan tetap mendapatkan pelayanan gizi selama masa tanggap darurat. Sementara itu, bila untuk daerah tidak menerapkan PSBB, belum ada transmisi lokal serta mobilisasi penduduk yang minimal, pelayanan gizi tetap dilakukan dan disesuaikan dengan pedoman yang sudah ada. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Pedoman Pelayanan Gizi pada Masa Tanggap Darurat Pandemi COVID-19 untuk tenaga kesehatan. Tidak ketinggalan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga merilis materi edukasi untuk tenaga medis perempuan dalam menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan kesehatan dan gizi selama masa tanggap darurat COVID-19.

Kehadiran RAN-PG dan RAD-PG akan mendukung kepatuhan terhadap penyediaan layanan pangan dan gizi yang berkelanjutan selama pandemi, serta berperan dalam memastikan terkoordinasinya kegiatan yang ditujukan untuk melindungi populasi yang rentan dan mencegah situasi pangan dan gizi memburuk, dengan pertimbangan khusus diberikan pada aspek gender dari dampak pandemi dan kondisi merugikan yang dialami perempuan dan anak perempuan.

3.3.2. Pengarusutamaan Gender Dalam Rencana Aksi Pangan dan Gizi

Pelaksanaan PUG juga diperkuat pasca keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Undang-Undang ini juga memandatkan keterlibatan kelompok perempuan di dalam pembangunan desa. Dalam konteks ini,



strategi PUG melalui PPRG menjadi strategis untuk diintegrasikan di dalam pembangunan desa. Dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan kerangka regulasi, masa berlaku SEB yang sudah selesai, serta kebutuhan kontekstual PPRG di dalam pembangunan desa, maka pada tahun 2017 disusun Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender dan dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan PUG pada tahun 2018 sampai saat ini. Penyusunan Perpres ditargetkan selesai pada akhir tahun 2020.

Dalam konteks pembangunan pangan dan gizi, aspek gender menjadi salah satu isu yang penting diperhatikan. Di dalam Global Nutrition Report 2020 disebutkan bahwa gender menjadi determinan sosial dari ketidaksetaraan Outcome gizi yang menyebabkan malnutrisi bersama dengan faktor usia, suku dan pendapatan atau status ekonomi. Aspek gender menyebabkan munculnya perbedaan dalam hal mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat atas intervensi pangan dan gizi yang pada akhirnya berdampak pada status gizi seseorang. Dengan kata lain, aspek gender bersama-sama dengan determinan sosial lainnya akan turut mempengaruhi efektifitas dan efisiensi intervensi. Oleh karena itu, perspektif gender menjadi salah satu pendekatan yang akan diintegrasikan di dalam penyusunan kebijakan/program/intervensi pembangunan pangan dan gizi, baik dari sisi proses maupun substansi.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti indeks pembangunan manusia (IPM) dengan memperhatikan ketimpangan gender. Hal ini terkait dengan Tujuan ke-5 Pembangunan Sosial Berkelanjutan yakni, Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Perhitungan IPG mengacu pada metodologi baru yang digunakan oleh UNDP Pada Tahun 2010 dengan indikator sebagai berikut :

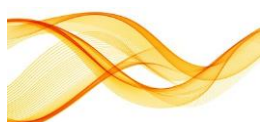
- a) Angka Harapan Hidup (e0); Laki-laki dan Perempuan
- b) Harapan Lama Sekolah (EYS); Laki-laki dan Perempuan
- c) Rata-rata Lama Sekolah (MYS); Laki-laki dan Perempuan
- d) Perkiraan pendapatan; Laki-laki dan Perempuan



Sebelum Tahun 2010, perhitungan IPG tidak mengukur langsung ketimpangan gender yang terjadi, namun hanya disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap gender. Pada metode ini, interpretasi IPG tidak bisa dipisahkan dari IPM. Perubahan Metode ini merupakan penyesuaian dari perubahan yang terjadi pada IPM. Selain itu, metode baru ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini digunakan rasio IPM Perempuan dan IPM Laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Kesenjangan gender dikatakan baik apabila nilainya mencapai angka 100 yang berarti semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki yang terjadi pada suatu wilayah.

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Gresik selama 4 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, namun pada Tahun 2020 Indeks Pembangunan Gender mengalami penurunan sebesar 0,12 dari Tahun 2019 sebesar 90,05 menjadi 89,93. Tingkat Ketimpangan Indonesia selalu lebih rendah dari Provinsi Jawa Timur kecuali pada tahun 2020, sedangkan tingkat Ketimpangan Kabupaten Gresik selalu lebih tinggi dari pada Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender sudah terbangun melalui partisipasi perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. Berdasarkan grafik dibawah menunjukkan bahwa angka IDG Kabupaten Gresik dari tahun 2017 sampai tahun 2019 selalu meningkat, namun mengalami penurunan di tahun 2020 dengan angka 63.29 yang masih berada dibawah rata-rata Jawa Timur dengan angka 73.03 dan nasional dengan angka 75.07.



BAB 4



PELAKSANAAN RENCANA AKSI

Pembangunan pangan dan gizi Kabupaten Gresik adalah sebuah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen di pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang lebih. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut pembangunan pangan dan gizi harus dilaksanakan secara terarah, berkesinambungan dan realistis.

Koordinasi dan kolaborasi antar OPD menjadi sangat penting dalam mencapai perbaikan pangan dan gizi di Kabupaten Gresik. Tujuan utama yang ingin diwujudkan dengan adanya perbaikan pangan dan gizi dengan pendekatan Multi sektor adalah terbentuknya Sumber Daya manusia yang cerdas, sehat, produktif secara berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

4.1. STRATEGI DAN AKSI PANGAN DAN GIZI

Dalam rangka mencapai perbaikan pangan dan gizi dalam upaya membentuk sumber daya manusia Kabupaten Gresik yang cerdas produktif dan berdaya saing diperlukan strategi dan aksi pangan dan gizi. Strategi dan aksi pangan dan gizi Kabupaten Gresik dapat diuraikan seperti tabel di bawah ini.



Tabel 4. 1 Strategi dan Aksi Pangan dan Gizi Kabupaten Gresik

No.	Strategi	Aksi	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD Penanggung Jawab	Target 2024
1) Tujuan Strategis : Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman							
1.1.	Peningkatan produksi pangan yang beragam	Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Dinas Pertanian	1 dokumen
		Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap kab/kota			Peningkatan produksi padi	Dinas Pertanian	397.030 ton
					Peningkatan produksi jagung	Dinas Pertanian	126.820 ton
					Peningkatan produksi ubi kayu	Dinas Pertanian	12.084 ton
					Peningkatan produksi kacang tanah	Dinas Pertanian	2.088 ton
					Peningkatan produksi kedelai	Dinas Pertanian	167 ton
					Peningkatan Produksi Kacang Hijau	Dinas Pertanian	337 ton
					Peningkatan produksi sayur	Dinas Pertanian	30.351 ton
					Peningkatan produksi buah	Dinas Pertanian	116.387 ton

No.	Strategi	Aksi	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD Penanggung Jawab	Target 2024
					Peningkatan produksi daging	Dinas Pertanian	2.585 ton
					Peningkatan produksi telur	Dinas Pertanian	3.001 ton
		Memperluas upaya pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta jaminan keamanan dan mutu pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Pertanian	1 Laporan
					Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal di kabupaten gresik	Dinas Pertanian	4 kelompok
		Melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk memasyarakatkan kegiatan pemanfaatan pekarangan dengan meningkatkan penggunaan benih bersertifikat					
		Memberdayakan peran perempuan untuk ikut dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Pertanian	n/a



No.	Strategi	Aksi	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD Penanggung Jawab	Target 2024
					Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal di kabupaten gresik	Dinas Pertanian	4 kelompok
1.2.	Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi)	Meningkatkan kerjasama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	2 dokumen
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian	6 dokumen
				Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Dinas Pertanian	2 laporan
				Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (renstra)	Dinas Pertanian	12 laporan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk	BPOM dan Dinas Kesehatan	12 dokumen



No.	Strategi	Aksi	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD Penanggung Jawab	Target 2024
				yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		
					Persentase Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memenuhi ketentuan (Peraturan Lama)	BPOM dan Dinas Kesehatan	90 %
				Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	BPOM dan Dinas Kesehatan	36 unit
					Jumlah penyuluhan Keamanan Pangan bagi IRTP di wilayah dan waktu tertentu	BPOM dan Dinas Kesehatan	4 kelompok
		Menguatkan kapasitas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk keamanan pangan asal tumbuhan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	2 dokumen
		Penguatan kapasitas pengawasan bagi Balai Veteriner dalam rangka keamanan pangan asal hewan					



No.	Strategi	Aksi	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD Penanggung Jawab	Target 2024
1.3.	Pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan di provinsi/kabupaten/kota	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	1 Laporan
					Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	100 ton
		Mengembangkan dukungan konstruksi lumbung pangan masyarakat di desa (LPMDes)	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang tersedia	Dinas Pertanian	46 unit
					Jumlah Lumbung Pangan yang akan dibangun	Dinas Pertanian	1 unit
1.4.	Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (foodloss)	Mengembangkan pertanian modern (smart farming) untuk mengurangi food loss	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Dinas Pertanian	16 Laporan
		Menyediakan akses/bantuan informasi, komunikasi, dan teknologi kepada petani, nelayan, dan peternak terkait	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Dinas Pertanian	16 Laporan
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu	Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen



No.	Strategi	Aksi	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD Penanggung Jawab	Target 2024
					Kabupaten/Kota yang Tersedia		
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen
		Melakukan pendampingan produsen pangan dalam pengendalian food loss melalui peningkatan kapasitas	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Dinas Pertanian	16 Laporan
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Dinas Kelautan dan Perikanan	97 orang
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi,	Dinas Kelautan dan Perikanan	23 kelompok



No.	Strategi	Aksi	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD Penanggung Jawab	Target 2024
					Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Dinas Kelautan dan Perikanan	26 unit usaha
		Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan food loss	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan	Dinas Pertanian	2 unit
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dinas Kelautan dan Perikanan	1 layanan
1.5.	Pengayaan nilai gizi sumber pangan melalui biofortifikasi	Menyusun peta jalan biofortifikasi pangan di Indonesia untuk perbaikan kebijakan yang ada					
		Mengembangkan biofortifikasi di berbagai komoditi pangan					

2) Tujuan Strategis : Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman



No.	Strategi	Aksi	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD Penanggung Jawab	Target 2024
2.1.	Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan	Memfaatkan panel harga pangan sebagai early warning system (EWS) tetap aktif terpantau dan dilaporkan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Dinas Pertanian	2 laporan
		Meningkatkan jenis komoditi pangan yang didistribusikan Toko Tani Indonesia (TTI) mencakup pangan komoditas unggulan daerah (kelompok hewani dan hortikultura) dan pangan lokal	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Dinas Pertanian	2 laporan
				Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan	Dinas Pertanian	2 unit
2.2.	Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga pangan	Menyusun prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dinas Pertanian	1 dokumen
		Menambahkan informasi sayur dan buah sebagai komoditi yang ikut dipantau dalam panel harga pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Pertanian	1 dokumen
2.3.	Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha	Membina UMKM/Koperasi/ BUMDes dalam pengembangan industri pangan lokal (PIPL) untuk peningkatan gizi kelompok rawan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan	196.177 Ton



No.	Strategi	Aksi	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD Penanggung Jawab	Target 2024
	Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan						
2.4.	Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam	Mengembangkan mekanisme pemanfaatan beras bifortifikasi dan fortifikasi menjadi salah satu komoditas bantuan pangan non tunai (BPNT)					
		Mengembangkan keberagaman pangan dengan nilai gizi yang baik sebagai komoditas Kartu Sembako/ BPNT					
		Mengintegrasikan pelayanan gizi esensial pada program bantuan sosial untuk kelompok termarginalkan (perempuan, gelandangan, penyandang disabilitas, penyandang masalah hukum, terlantar, etnis minoritas)					
2.5.	Penyediaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat	Revitalisasi/mengaktifkan program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) bekerjasama dengan supplier bahan pangan lokal di daerah masing-masing	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	100 ton



No.	Strategi	Aksi	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD Penanggung Jawab	Target 2024
2.6.	Penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana	Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengolah pangan lokal	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dinas Pertanian	120 keluarga
		Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1-3 dalam perencanaan dan penyusunan program untuk ketahanan pangan dan gizi	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	1 laporan
				Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	1 dokumen
2.7.	Pengembangan sistem logistik pangan	Mengembangkan sistem logistik pangan melalui penguatan supply chain ecosystem berdasarkan kondisi daerah	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Dinas Pertanian	1 laporan
		Mengembangkan kerjasama industri start up dengan kelompok tani untuk distribusi pangan melalui jalur e-commerce	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan	Dinas Pertanian	2 unit
3) Tujuan Strategis : Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)							
3.1.	Penguatan sistem kewaspadaan	Mengintegrasikan sistem informasi pangan dan gizi	Program Peningkatan Diversifikasi dan		Pendataan PPH	Dinas Pertanian	86,5 %



No.	Strategi	Aksi	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD Penanggung Jawab	Target 2024
	pangan dan gizi dan pemantauan status gizi	(SIPG) dalam rangka penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di pusat dan daerah beserta pemanfaatannya	Ketahanan Pangan Masyarakat				
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dinas Pertanian	1 unit
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	1 laporan
3.2.	Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahun	Meningkatkan pemanfaatan peta rawan pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dinas Pertanian	1 dokumen
3.3.	Edukasi pola konsumsi pangan perserorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini	Meningkatkan kegiatan advokasi panganekaragaman konsumsi pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dalam Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Pertanian	1 laporan
					Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat dalam panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal di kabupaten gresik	Dinas Pertanian	4 kelompok



No.	Strategi	Aksi	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD Penanggung Jawab	Target 2024
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	12 dokumen
		Melaksanakan kegiatan kampanye "isi piringku menu khas daerah/pangan lokal" di wilayah kabupaten/kota melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia secara periodik	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyusunan dan Penetapan target konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Dinas Pertanian	1 dokumen
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Dinas Pertanian	3 laporan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	12 dokumen
		Melakukan penguatan kampanye gerakan makan ikan (gemarikan)	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan	196.177 ton
		Meningkatkan komitmen pimpinan untuk mengintegrasikan pesan kunci pedoman gizi seimbang (PGS) ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan atas		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	12 dokumen
		Melakukan peningkatan kapasitas komunikasi perubahan perilaku antar individu bagi Tenaga					



No.	Strategi	Aksi	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD Penanggung Jawab	Target 2024
		Pendamping di Desa (TPG, KPM, PLKB, Pendamping PKH) untuk meningkatkan kepatuhan penerima manfaat menjadi 90%					
		Melakukan kerjasama dengan influencer, tokoh masyarakat /agama /politik/ selebgram lokal untuk kampanye perubahan perilaku	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan	12 dokumen
		Mengembangkan platform rujukan informasi bagi jurnalis dan media untuk komunikasi perubahan perilaku konsumsi pangan B2SA					
		Meningkatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dalam dalam pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	Dinas Kesehatan	12 dokumen
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan	12 dokumen
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan	12 dokumen
		Melakukan orientasi agent of change pencegahan penyakit tidak menular (PTM)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	12 dokumen



No.	Strategi	Aksi	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD Penanggung Jawab	Target 2024
			Upaya Kesehatan Masyarakat				
		Meningkatkan peran PKK dalam pendampingan keluarga untuk promosi aktivitas fisik, peningkatan konsumsi buah dan sayur, pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Pertanian	1 laporan
					Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal di kabupaten gresik	Dinas Pertanian	4 kelompok
					Jumlah kelompok/PKK yang diberdayakan	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Dinas Pertanian	n/a
					Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan keluarga	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Desa	375 kelompok
3.4.	Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan	Meningkatkan sosialisasi pentingnya pencantuman informasi kandungan kadar gula, garam, lemak (GGL) dalam produksi pangan olahan dan siap saji	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	12 dokumen



No.	Strategi	Aksi	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD Penanggung Jawab	Target 2024
		Meningkatkan Sosialisasi Keamanan dan mutu Pangan Jajanan Anak Sekolah	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	2 dokumen
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	12 dokumen
					Jumlah Kantin Sekolah yang difasilitasi P2KP	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan	n/a
					Jumlah kantin sekolah yang dilatih dan difasilitasi penerapan prinsip-2 Keamanan Pangan di Kantin Sekolah	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan	n/a
					Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	BPOM dan Dinas Kesehatan	54 %
					Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	BPOM dan Dinas Kesehatan	104 buah
					Prosentase Pangan Jajanan dan Siap saji yang memenuhi syarat	Dinas Kesehatan	71 %
			Pendidikan Anak Usia Dini	UKS	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sehat (PMTAS)	Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Guru	20 lembaga



No.	Strategi	Aksi	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD Penanggung Jawab	Target 2024
						dan Wali Murid	
3.5.	Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan	Mengembangkan konsep isi piringku dengan pangan lokal di kab/kota	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dinas Pertanian	120 keluarga
		Mengembangkan peta jalan diversifikasi pangan untuk peningkatan konsumsi sayur, buah, dan protein hewani					
3.6.	Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan	Membina kabupaten/kota untuk menetapkan regulasi mengenai ASI Eksklusif			Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	Dinas Kesehatan	n/a
					Persentase Puskesmas memiliki konselor menyusui	Dinas Kesehatan	n/a
					Persentase puskesmas membina kelompok pendukung ASI	Dinas Kesehatan	n/a



No.	Strategi	Aksi	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD Penanggung Jawab	Target 2024
	Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) berbasis pangan lokal	Meningkatkan aksesibilitas terhadap makanan tambahan berbahan dasar pangan lokal			Persentase peserta didik PAUD yang mendapat pemberian makanan tambahan	Dinas Pertanian dan Dinas Pendidikan	n/a
3.7.	Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat	Mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan suplementasi gizi (makanan tambahan, TTD, dan kapsul vit. A) untuk mencapai cakupan target sasaran sebesar 90 % pada tahun 2024		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	24.277 orang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	101.274 orang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	174.659 orang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	12 dokumen
					Kunjungan ibu hamil (K1)	Dinas Kesehatan	n/a
					Kunjungan ibu hamil (K4)	Dinas Kesehatan	n/a
					Persentase balita 6 - 59 bulan mendapat kapsul vitamin A	Dinas Kesehatan	n/a
					Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC (Ante Natal Care) berkualitas	Dinas Kesehatan	n/a
					Persentase balita ditimbang berat badannya D/S	Dinas Kesehatan	n/a



No.	Strategi	Aksi	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD Penanggung Jawab	Target 2024
					Berat Badan Bayi Lahir Rendah	Dinas Kesehatan	n/a
					Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	Dinas Kesehatan	n/a
					Persentase balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A	Dinas Kesehatan	n/a
					BADUTA ditimbang badannya	Dinas Kesehatan	n/a
					BADUTA dengan BGM	Dinas Kesehatan	n/a
					Anak Balita Mendapat Vitamin A	Dinas Kesehatan	n/a
					Pelayanan kesehatan anak balita	Dinas Kesehatan	n/a
		Mendorong pemanfaatan RUTF (Ready to Use Therapeutic Food) berbahan dasar pangan lokal produksi dalam negeri dalam pelayanan gizi					
		Meningkatkan sasaran pemberian bubuk tabur gizi kepada anak umur 6-59 bulan					
		Memperluas implementasi pemberian bubuk tabur gizi kepada anak umur 6-24 bulan					
		Meningkatkan tata kelola pelayanan gizi pada situasi darurat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dinas Kesehatan	12 dokumen



No.	Strategi	Aksi	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD Penanggung Jawab	Target 2024
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	12 dokumen
		Meningkatkan kapasitas puskesmas dalam melaksanakan pelayanan terpadu (Pandu) PTM	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Dinas Kesehatan	2 unit
				Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	1 puskesmas
				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Dinas Kesehatan	32 puskesmas
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan alkes/ alat penunjang medik Faskes	Dinas Kesehatan	32 puskesmas
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan	12 dokumen
					Jumlah Posyandu	Dinas Kesehatan	n/a



No.	Strategi	Aksi	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD Penanggung Jawab	Target 2024
					Posyandu aktif	Dinas Kesehatan	n/a
					Posyandu Purnama	Dinas Kesehatan	n/a
					Posyandu Mandiri	Dinas Kesehatan	n/a
					Persentase puskesmas dengan tenaga terlatih tata laksana gizi	Dinas Kesehatan	n/a
		Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam Gerakan Lawan Obesitas dan pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) di desa	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	893.447 orang
		Mengintegrasikan pengendalian dampak COVID-19 terhadap pedoman yang berkaitan dengan perbaikan gizi yang diterbitkan pemerintah pusat yang digunakan di daerah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah penduduk yang mendapatkan vaksin covid	Dinas Kesehatan	100.000 orang
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dinas Kesehatan	12 dokumen
		Memberikan perlindungan gizi kepada pekerja perempuan (sektor swasta) terdampak pandemi COVID-19					
3.8.	Pengendalian pemborosan pangan (food waste)	Menginisiasi gerakan masyarakat mengurangi food waste					
		Mengembangkan sistem jual beli atau jaringan pasar produk pangan imperfect					



No.	Strategi	Aksi	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD Penanggung Jawab	Target 2024
		Melakukan kerjasama kesepahaman (MoU) dengan industri pangan dan perhotelan untuk mengendalikan food waste					
		Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan food waste					
3.9.	Penambahan jenis dan komposisi zat gizi (fortifikasi) pada pangan tertentu sebagai pengayaan nilai gizi	Menyusun peta jalan fortifikasi pangan di Indonesia untuk perbaikan kebijakan yang ada					
		Mengembangkan kerjasama dengan dunia usaha untuk memproduksi fortifikan dan kernel fortifikasi					
		Melaksanakan Pengawasan terpadu lintas K/L/D dalam pengawasan dan pembinaan implementasi pangan fortifikasi					
		Melaksanakan pengawasan implementasi aturan pangan berfortifikasi sesuai SNI terkini yang berlaku					
3.10.	Peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan	Mendorong ditetapkannya minuman berpemanis dalam kemasan sebagai barang kena cukai baru					
		Mendorong ekstensifikasi pilihan lebih sehat""/healthy					



No.	Strategi	Aksi	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD Penanggung Jawab	Target 2024
		choice pangan siap saji					
4) Tujuan Strategis : Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi							
4.1.	Penguatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah	Membentuk forum koordinasi lintas sektor/ pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev yang terintegrasi dengan forum koordinasi percepatan penurunan stunting	Pendidikan Anak Usia Dini	Pembinaan Kelembagaan PAUD	Penurunan Angka Stunting di Satuan PAUD	Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Guru dan Wali Murid	8 Lokus
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	DPMD	100 orang
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Dinas Pertanian	3 laporan
		Mengintegrasikan RAD-PG di dalam pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting (aksi #2)	Pendidikan Anak Usia Dini	Pembinaan Kelembagaan PAUD	Penurunan Angka Stunting di Satuan PAUD	Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Guru dan Wali Murid	8 lokus
		Memperkuat peran Kemendagri dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RAD-					



No.	Strategi	Aksi	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD Penanggung Jawab	Target 2024
		PG di Provinsi dan Kabupaten/Kota					
4.2.	Penguatan peran sektor non pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi di pusat dan daerah	Meningkatkan koordinasi jejaring lintas pemangku kepentingan (non-pemerintah) dalam scaling up program pangan dan gizi di pusat dan daerah	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Dinas Pertanian	3 laporan
		Melibatkan sektor swasta, industri dan perdagangan pangan untuk aktif melakukan kegiatan komunikasi perubahan perilaku konsumsi masyarakat, food loss dan food waste					
4.3.	Penguatan dimensi gender dalam pembangunan pangan dan gizi	Melakukan peningkatan kapasitas PUG dan PURG di institusi terkait pembangunan pangan dan gizi di pusat dan daerah	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Pertanian	1 laporan
					Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal di kabupaten gresik	Dinas Pertanian	4 kelompok
		Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Pertanian	1 laporan



No.	Strategi	Aksi	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD Penanggung Jawab	Target 2024
					Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal di kabupaten gresik	Dinas Pertanian	4 kelompok
		Peningkatan peran perempuan dalam implementasi pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak, peningkatan aktifitas fisik dan deteksi dini					
		Mengembangkan mekanisme pengawasan sosial oleh organisasi perempuan, masyarakat dan media terhadap kebijakan ASI Eksklusif, susu formula, dan produk bayi lainnya yang berlaku					
4.4.	Penguatan regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi	Mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan regulasi terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan / KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang Dikelola	Dinas Pertanian	1 dokumen

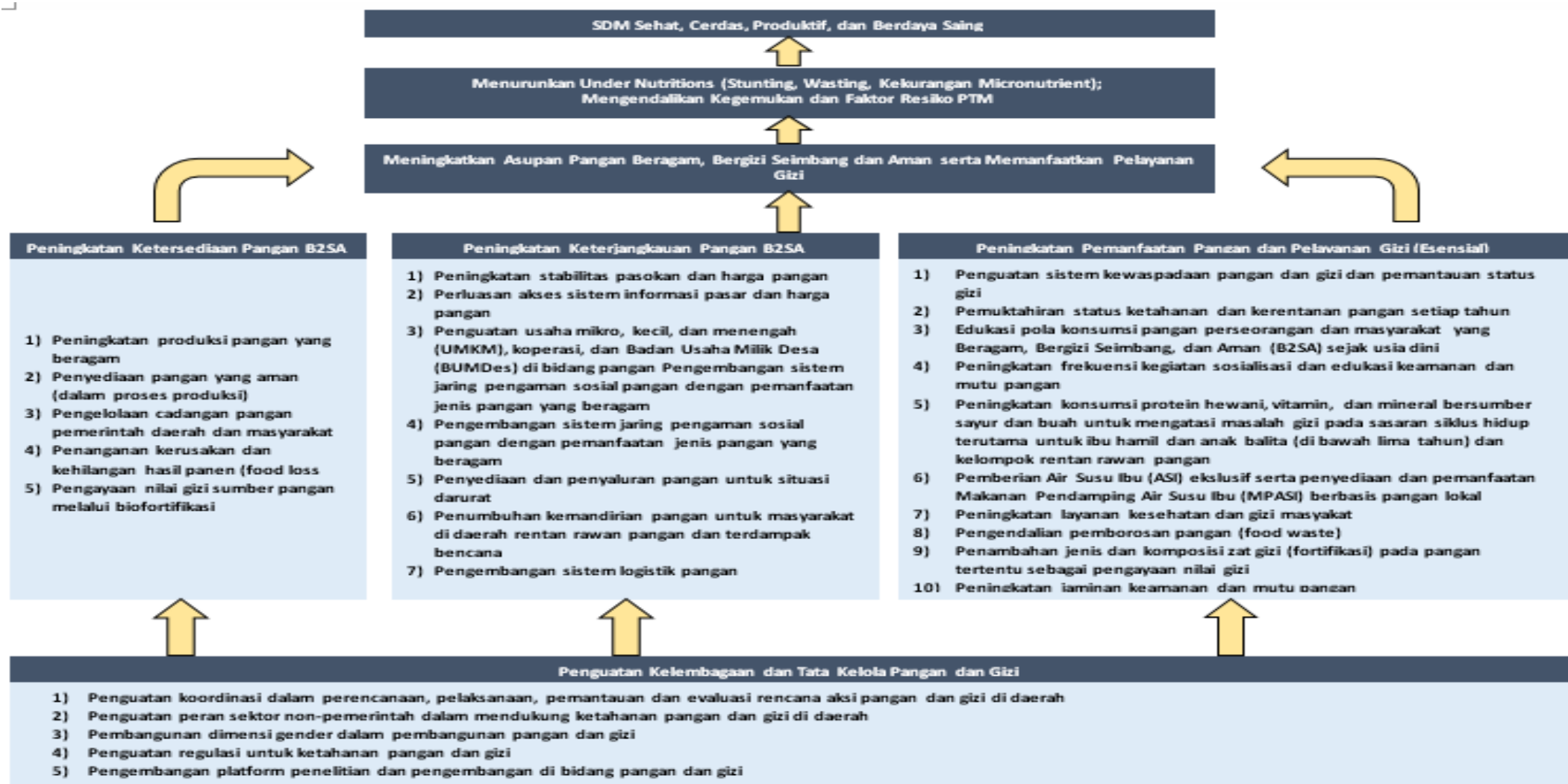


No.	Strategi	Aksi	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD Penanggung Jawab	Target 2024
				Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dinas Pertanian	1 dokumen
		Menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan produk inovasi pangan yang layak (memenuhi persyaratan gizi, keamanan, acceptibilitas, harga, shelf live) untuk diadopsi ke dalam pelayanan gizi					
4.5.	Pengembangan platform penelitian dan pengembangan di bidang pangan dan gizi	Meningkatkan penelitian dan pengembangan untuk pencegahan dan penanganan food loss dan food waste termasuk inovasi smart farming					
		Melakukan kajian gap analysis program pengendalian defisiensi zat gizi mikro di Indonesia					
		Menyusun kajian yang diperlukan untuk mengembangkan kebijakan pemberian suplementasi multi gizi mikro					
		Mengembangkan community based data untuk pemetaan dan evaluasi masalah gizi mikro ditingkat kabupaten/kota					



No.	Strategi	Aksi	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD Penanggung Jawab	Target 2024
		Mengembangkan biofortifikasi dan fortifikasi di berbagai komoditi pangan					
		Menyelenggarakan forum nasional penelitian dan pengembangan pangan dan gizi secara berkala					
		Menembangkan inovasi pemanfaatan pangan lokal untuk perbaikan konsumsi gizi keluarga					
		Melakukan kajian literasi gizi untuk mendukung kebijakan perubahan perilaku makan B2SA yang juga memuat pemetaan promosi perubahan perilaku cegah stunting yang sudah beredar					
		Mengembangkan jejaring laboratorium bidang pangan dan gizi untuk pembaharuan Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI)/Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) sesuai kondisi Indonesia					



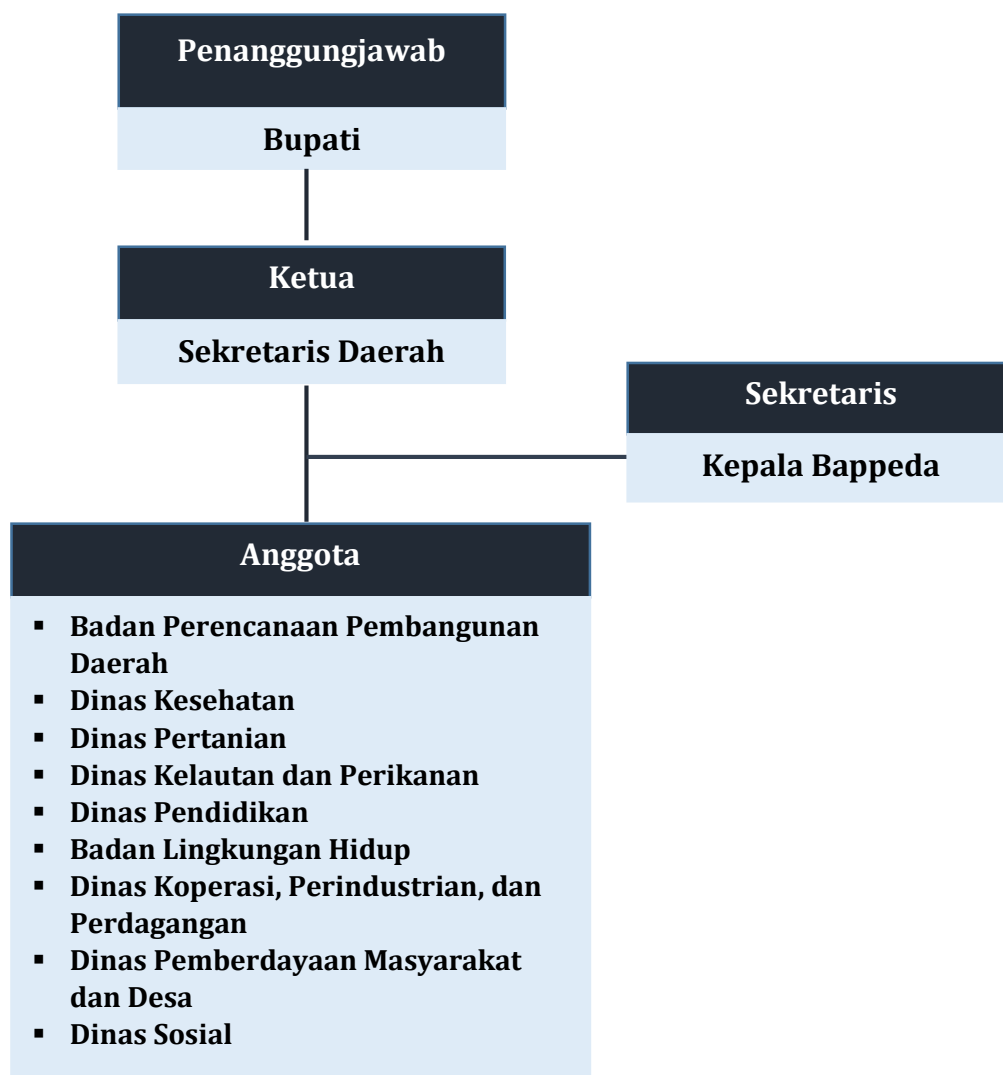


Gambar 4.1 Kerangka Berpikir RAD -PG Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024



4.2. PENGORGANISASIAN RAD PG KABUPATEN GRESIK

Prinsip pelaksanaan RAD-PG Multisektor di Kabupaten Gresik adalah *collaborative actions* dari lembaga-lembaga dalam rangka pendekatan multisektor. Beberapa kelembagaan dan perannya dapat disampaikan sebagai berikut ini



Gambar 4. 2 Tim RAD PG Kabupaten Gresik

4.3. PERAN SEKTOR NON PEMERINTAH

Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi sesuai dengan peraturan perundang -



undangan yang berlaku. Bentuk partisipasi sektor non-pemerintah berkaitan dengan RAD-PG, dapat terlaksana melalui kerja sama dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Keterlibatan dalam memberikan masukan dalam untuk penyusunan dokumen RAD-PG di provinsi, atau pendampingan daerah lainnya di kabupaten/kota;
2. Menyelenggarakan kajian/analisis/praktik baik dan menyusun serta diseminasi hasilnya untuk rekomendasi kebijakan terkait Pangan & Gizi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat dan daerah;
3. Komunikasi perubahan perilaku seperti: advokasi, kampanye, sosialisasi, dan komunikasi antar individu dengan mempertimbangkan konteks lokal;
4. Dukungan kepada pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas pelaksana program serta pendampingan teknis dalam menyusun RAD-PG serta implementasi programnya;
5. Pemantauan dan evaluasi RAD-PG yang bersifat partisipatif oleh masyarakat sipil atau kelompok pemangku kepentingan lainnya dalam rangka social control terhadap program pemerintah di bidang pangan dan gizi, serta diseminasi hasilnya;
6. Dukungan inovasi, piloting, praktik baik berbasis kearifan lokal dalam mendukung implementasi RAN-PG dan RAD-PG.

4.4. PEMBIAYAAN

Untuk menjalankan rencana aksi ini, setiap pelaksana memerlukan dukungan dan pengelolaan dana yang dapat berasal dari berbagai sumber. Sumber pendanaan utama pelaksanaan RAD-PG berasal baik dari APBD, APBN maupun sumber pendanaan lain yang sah. Penggunaan dana APBD sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB 5



PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

5.1. PEMANTAUAN

Pemantauan diperlukan untuk memberikan masukan bagi proses pelaksanaan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Sementara itu evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil yang diperoleh terutama output maupun outcome dalam satu periode tertentu, misalnya semesteran atau tahunan. Untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi dan untuk menjadi arahan metodologi, instrumen dan indikator, maka tim pusat akan menyiapkan pedoman pemantauan dan evaluasi.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi disesuaikan dengan pedoman pemantauan dan evaluasi yang diterbitkan oleh Pusat. Adapun mekanisme kerja pemantauan dan evaluasi adalah :

1. menyiapkan kerangka acuan pemantauan dan evaluasi;
2. menyiapkan instrumen pemantauan dan evaluasi;
3. menentukan waktu pemantauan tim dan lokasi;
4. melakukan pemantauan;
5. menyiapkan laporan hasil pemantauan dan umpan balik untuk lokasi pemantauan;
6. evaluasi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga memungkinkan dengan menggunakan pihak eksternal;
7. menentukan waktu evaluasi, tim evaluasi, dan lokasi evaluasi;
8. menyiapkan laporan hasil evaluasi.



Pemantauan pada capaian keluaran kegiatan di tingkat Kabupaten/kota dilakukan dengan cara:

1. Pemantauan RAD-PG Kabupaten/kota

a. Substansi yang dipantau

Berdasarkan dokumen RAD-PG maka substansi yang dimonitor adalah:

- 1) Program, kegiatan, dan indikator kinerja (target dan capaian) menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi A;
- 2) Proses pelaksanaan RAD-PG dievaluasi melalui penilaian/skoring terhadap beberapa penanda kemajuan oleh forum teknis RAD-PG; tantangan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi B.

Apabila diperlukan kegiatan pemantauan dapat diperluas pada kegiatan yang dilakukan oleh dunia usaha, masyarakat madani, dan mitra pembangunan.

b. Pelaksana

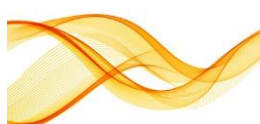
Pelaksana pemantauan adalah OPD dan pemangku kepentingan lain dengan dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten/kota atau OPD lain yang ditetapkan kepala daerah.

c. Waktu

Frekuensi pemantauan dilakukan minimal dua kali setahun terdiri dari pertengahan dan akhir tahun yang diikuti pemangku kepentingan terkait RAD-PG Kabupaten/kota.

d. Umpan Balik Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Umpan balik disampaikan kepada masing-masing pemangku kepentingan agar dapat dilakukan tindak lanjut sesuai permasalahan. Umpan balik disampaikan satu bulan setelah pemantauan dilakukan dengan menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi D.



2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di Kecamatan

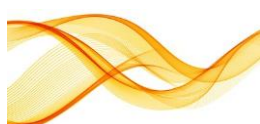
a. Pertemuan Pemantauan dan Evaluasi :

- 1) Pertemuan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kabupaten/kota dapat dilakukan dilaksanakan setiap tahun dan diikuti oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan rencana aksi pangan dan gizi;
- 2) Substansi Pemantauan dan Evaluasi adalah komponen yang terdapat pada dokumen RAD-PG dan pada dokumen perencanaan di daerah, yang terdiri dari beberapa penanda kemajuan serta tantangan dan rencana tindak lanjut menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi B;
- 3) Pelaksana : Pelaksana pertemuan pemantauan dan evaluasi adalah pemerintah Kabupaten/kota dengan peserta pemangku kepentingan terutama OPD dan peserta dari kecamatan yang terlibat di dalam rencana aksi pangan dan gizi. Apabila memungkinkan dapat mengikutsertakan dari pemerintah desa/kelurahan;
- 4) Hasil Workshop : Hasil pertemuan disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan agar segera ditindaklanjuti.

b. Kunjungan Lapangan (Supervisi)

- 1) Kunjungan lapangan dapat dilakukan di tingkat kecamatan dan atau kelurahan/desa dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan rencana aksi pangan dan gizi.
- 2) Substansi kunjungan lapangan adalah hasil dan tantangan pelaksanaan kegiatan terkait pangan dan gizi di tingkat kecamatan.
- 3) Pelaksana : Pelaksana kunjungan lapangan adalah OPD kabupaten/kota dan atau pemangku kepentingan lain yang terlibat di dalam rencana aksi pangan dan gizi.
- 4) Hasil kunjungan lapangan : Hasil kunjungan disampaikan kepada daerah lokasi kunjungan agar segera ditindaklanjuti.

Untuk pemantauan terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan RAD-PG dapat dilakukan dengan metode skoring (skala 1-4) pada indikator kemajuan sebagai berikut. Format lebih lengkap dapat dilihat pada Form Evaluasi B.



1. Memperkuat Kemitraan Antar Pemangku Kepentingan

Adanya mekanisme koordinasi dalam forum memungkinkan para pemangku kepentingan untuk terlibat dan bekerja lebih baik. Forum teknis RAD-PG dianggap berfungsi jika memungkinkan mobilisasi dan keterlibatan pemangku kepentingan, membantu OPD yang relevan dalam pengambilan keputusan serta mendorong rekomendasi bersama. Penanda kemajuan proses ini adalah:

- a. *Mengembangkan Mekanisme Koordinasi di Daerah Masing-masing* - Penanda kemajuan ini melihat ada/tidaknya mekanisme koordinasi khusus di antara pemangku kepentingan atau mekanisme pembiayaan baru dalam melaksanakan kegiatan RAD-PG
- b. *Berkoordinasi Secara Internal dan Memperluas Mitra yang Dilibatkan* - Penanda kemajuan ini melihat koordinasi internal yang terjadi dalam forum teknis RAD-PG serta melihat upaya meningkatkan pengaruh dengan melibatkan pemangku kepentingan baru yang berpotensi.
- c. *Berkontribusi pada Forum Teknis RAD-PG* - Penanda kemajuan ini melihat apakah forum teknis RAD-PG mendorong kolaborasi internal, pada isu-isu yang paling relevan dengan ketahanan pangan dan gizi di daerah.
- d. *Pelaporan dan Refleksi Kontribusi Serta Capaian yang Diraih* - Penanda kemajuan ini melihat apakah forum teknis RAD-PG melakukan pelacakan keuangan dan melaporkan implementasi tindakan yang disepakati, oleh masing-masing pemangku kepentingan. Kemampuan forum untuk mendorong akuntabilitas juga dipertimbangkan.
- e. *Mempertahankan Dampak Politik dari Forum Teknis RAD-PG* - Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pendekatan multisektoral untuk ketahanan pangan dan gizi diterima sebagai prioritas daerah dan dilembagakan oleh semua pemangku kepentingan serta melihat apakah mekanisme koordinasi yang ada sifatnya berkelanjutan.



2. Memastikan Kebijakan dan Kerangka Hukum yang Mendukung

Keberadaan kebijakan yang koheren akan menginformasikan dan memandu pemangku kepentingan bekerja sama untuk ketahanan pangan dan gizi.

Penanda kemajuan proses ini adalah:

- a. *Analisis Berkelanjutan Terhadap Peraturan yang Relevan dengan Pangan dan Gizi* - Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana kebijakan dan peraturan terkait pangan dan gizi (spesifik dan sensitif) yang ada, dianalisis menggunakan proses konsultatif multisektoral.
- b. *Advokasi yang berkelanjutan Untuk Pengembangan, Pemutakhiran dan Penyebaran Kebijakan yang Relevan dengan Pangan dan Gizi*- Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana para pemangku kepentingan bekerja sama, mempengaruhi dan mengadvokasi pengembangan kebijakan pangan dan gizi dan diseminasinya (strategi advokasi dan komunikasi diterapkan untuk mendukung diseminasi kebijakan yang relevan).
- c. *Mengembangkan dan/atau Memperbarui Kebijakan Melalui Upaya Yang Terkoordinasi* - Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pemangku kepentingan dan mitra non-pemerintah - mengoordinasikan masukan mereka untuk memastikan pengembangan kebijakan yang mendukung ketahanan pangan dan gizi.
- d. *Melaksanakan Kebijakan dan Peraturan* - Penanda kemajuan ini melihat ketersediaan mekanisme untuk mengoperasionalkan dan menegakkan kebijakan/peraturan, seperti peraturan mengenai ASI eksklusif dan cuti orang tua, fortifikasi pangan, keamanan pangan, diversifikasi pangan, dan lainnya.
- e. *Memantau dan Melaporkan Pembelajaran dan Dampak Kebijakan*- Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana kebijakan pangan dan gizi yang ada telah ditinjau dan dievaluasi untuk mendokumentasikan praktik-praktik yang baik dan dibagikan dalam forum teknis RAD-PG.



3. Menyelaraskan Kegiatan

Penyelarasan kegiatan lintas sektor yang berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan dan gizi akan menunjukkan sejauh mana pemangku kepentingan bekerja sama secara efektif, dan sejauh mana kebijakan atau peraturan diimplementasikan untuk memastikan bahwa setiap orang, khususnya perempuan dan anak-anak mendapat manfaat dari program perbaikan gizi. Penanda kemajuan proses ini adalah:

- a. *Sinkronisasi Program/Kegiatan Sesuai Target Pembangunan Pangan dan Gizi Nasional* - Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pemangku kepentingan di daerah menyelaraskan rencana dan program mereka sendiri di bidang pangan gizi sebagai cerminan kebijakan dan prioritas nasional. Ini berfokus pada penyelarasan kegiatan lintas sektor antar-pemangku kepentingan terkait yang secara signifikan berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan gizi.
- b. *Menerjemahkan Kerangka Kebijakan dan Hukum ke Dalam Matriks Aksi RAD-PG* - Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana para pemangku kepentingan di daerah menyetujui RAD-PG sebagai instrumen untuk menyelaraskan intervensi di bidang pangan dan gizi dengan target pangan dan gizi yang teridentifikasi dengan jelas.
- c. *Mengatur dan Melaksanakan Prioritas Tahunan yang Terdapat dalam RAD-PG* - Penanda kemajuan ini melihat kegiatan prioritas dalam RAD-PG terlaksana di daerah.
- d. *Bersama-sama Memantau Kegiatan Prioritas Sesuai Dengan RAD PG* - Penanda kemajuan ini melihat bagaimana sistem informasi dan laporan kemajuan digunakan untuk memantau pelaksanaan kegiatan prioritas untuk ketahanan pangan dan gizi.
- e. *Mengevaluasi Implementasi Kegiatan RAD-PG Untuk Memahami, Mencapai, dan Mempertahankan Dampaknya Terhadap Ketahanan Pangan dan Gizi* - Penanda kemajuan ini melihat bagaimana hasil dievaluasi untuk menginformasikan pengambilan keputusan dan membangun basis bukti bidang pangan dan gizi yang lebih baik.



4. Pelacakan Pendanaan dan Mobilisasi Sumber Daya

Menilai kelayakan finansial RAD-PG untuk melaksanakan kegiatan sangat penting untuk menentukan kebutuhan pendanaan. Ini didasarkan pada kemampuan untuk melacak pengeluaran yang direncanakan di seluruh instansi yang terlibat. Penanda kemajuan proses ini adalah:

- a. *Mengkaji Sumber Pendanaan dan Kemungkinan Pendanaan Lain untuk Kegiatan RAD-PG* - Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memberikan masukan untuk penetapan biaya terhadap kegiatan RAD-PG lintas sektor. Data keuangan dibagikan secara transparan dengan mitra percepatan perbaikan gizi.
- b. *Memantau dan Melaporkan Pendanaan* - Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pemerintah dan pemangku kepentingan dapat melacak pengalokasian dan pengeluaran keuangan mereka (jika tersedia) di seluruh sektor terkait dan/atau mengidentifikasi mekanisme/inisiatif pembiayaan baru. Forum teknis RAD-PG harus dapat melaporkan data keuangan secara transparan.
- c. *Menyelaraskan Sumber Daya Termasuk Mengatasi Kekurangan Pendanaan Kegiatan* - Penanda kemajuan ini melihat apakah pemerintah dan pemangku kepentingan mengidentifikasi kesenjangan keuangan dan memobilisasi dana tambahan, (termasuk dari mekanisme/inisiatif pembiayaan baru), melalui peningkatan penyelarasan dan alokasi anggaran, advokasi, dan pengaturan mekanisme pendanaan khusus untuk pendanaan kegiatan RAD-PG.
- d. *Distribusi Pendanaan* - Penanda kemajuan ini melihat bagaimana pemerintah dan pemangku kepentingan mengubah alokasi pendanaan menjadi pencairan yang sebenarnya.
- e. *Melakukan Kajian dan Penganggaran Pendanaan Tahunan Untuk Menjamin Keberlangsungan Pelaksanaan Kegiatan* - Penanda kemajuan ini melihat bagaimana pemerintah dan pemangku kepentingan secara kolektif memastikan pendanaan yang dapat diprediksi dan berjangka Panjang untuk dampak yang lebih baik.



Ini melihat pada perubahan penting, seperti keberlanjutan pendanaan, pembentukan mekanisme pendanaan yang fleksibel tetapi dapat diprediksi dan mengatasi kesenjangan pendanaan.

5. Pelaksanaan 8 Aksi Integrasi Intervensi Penurunan Stunting

Penanda kemajuan ini merupakan penanda tambahan dikhususkan untuk pemerintah kabupaten/kota untuk mendapatkan gambaran pemanfaatan dokumen RAD-PG dalam pelaksanaan aksi penurunan stunting di daerah sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi RADPG.

a. Analisis Situasi

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RADPG atau forum koordinasi percepatan penurunan stunting mampu memaksimalkan penggunaan analisis situasi seperti: analisis sebaran analisis sebaran masalah stunting; analisis ketersediaan program dan kesenjangan cakupan layanan; analisis penyampaian layanan pada sasaran; analisis kebutuhan penguatan koordinasi antar program dan antar lokasi.

b. Penyusunan Rencana Kegiatan

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RADPG atau forum koordinasi percepatan penurunan stunting mampu memanfaatkan RAD-PG dalam menyusun rencana program dan kegiatan terintegrasi dengan memanfaatkan hasil analisis situasi program pencegahan dan penurunan stunting.

c. Rembuk Stunting

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RADPG atau forum koordinasi percepatan penurunan stunting mampu menjadi memanfaatkan RAD-PG instrumen advokasi sekaligus sosialisasi bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam rembuk stunting.



d. *Sistem dan Manajemen Data Stunting*

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RADPG atau forum koordinasi percepatan penurunan stunting mampu memanfaatkan RAD-PG untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kesenjangan data; menilai sistem manajemen data saat ini; menyusun rencana tindak lanjut perbaikan sistem data; melakukan review terhadap perbaikan dan pemanfaatan sistem data.

e. *Review Kinerja Tahunan*

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RADPG atau forum koordinasi percepatan penurunan stunting mampu mengelaborasi data hasil pemantauan dan evaluasi RADPG untuk melaksanakan kegiatan review kinerja tahunan; mengidentifikasi sumber data dan pengumpulan data kinerja program/kegiatan, serta menyusun dokumen hasil review kinerja tahunan.

5.2. EVALUASI

Kegiatan evaluasi selain yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemantauan, dapat pula dilakukan tersendiri yang mencakup indikator masukan, proses, dan keluaran. Kegiatan evaluasi dapat juga dilakukan pada indikator dampak. Pelaksana evaluasi dilakukan oleh pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah. Waktu pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan pada paruh waktu/ mid-term dan akhir periode RAD-PG dengan ruang lingkup evaluasi terhadap intermediate outcome (16 indikator pembangunan bidang pangan) dan outcome (3 indikator pembangunan bidang gizi).

Apabila pemerintah daerah melaksanakan evaluasi tersendiri, maka pelaksana evaluasi dapat dilakukan secara mandiri atau dapat pula dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk resmi oleh pemerintah daerah. Evaluasi terkait Rencana Aksi Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Lampiran 1.



5.3. RENCANA TINDAK LANJUT RAD – PG KABUPATEN GRESIK

Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan RAD-PG akan muncul setelah pemantauan dan evaluasi dilaksanakan. Kendala-kendala yang ditemukan akan berdampak pada capaian rencana aksi yang tidak memenuhi target. Kendala-kendala ini merupakan suatu masalah yang membutuhkan pembenahan dan perbaikan lebih lanjut. Skema rencana tindak lanjut RAD-PG Kabupaten Gresik dapat dijelaskan pada Lampiran 2.

5.4. LAPORAN

Laporan pelaksanaan RAD-PG perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Laporan pelaksanaan RAD-PG disampaikan oleh bupati/walikota kepada gubernur. Selanjutnya gubernur menyampaikan Laporan pelaksanaan RAD-PG provinsi termasuk kabupaten/kota kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri. Pelaporan pelaksanaan RAD-PG di masing-masing jenjang dilakukan setiap 1 (satu) kali pada akhir tahun. Tujuan pelaporan RAD-PG Kabupaten Gresik, antara lain :

- a. memberikan informasi mengenai proses pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
- b. memberikan informasi mengenai pencapaian dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
- c. menyiapkan kebijakan dan rekomendasi pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi tahun berikutnya;
- d. menyiapkan bahan advokasi dan sosialisasi Rencana Aksi Pangan dan Gizi.



BAB 6



PENUTUP

6.1. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2024 merupakan kebijakan yang bersifat strategis Pemerintah Kabupaten Gresik dalam rangka mendukung komitmen pencapaian nasional sebagaimana telah dijabarkan dalam RPJMN tahun 2020-2024.

RAD-PG Kabupaten Gresik ini merupakan perencanaan sistematis dalam mencapai target-target Pembangunan bidang pangan dan gizi yang dijabarkan secara kuantitatif dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. RAD-PG ini selanjutnya akan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan yang ada, baik jangka menengah yaitu RPJMD dan Renstra OPD, maupun jangka pendek/tahunan, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik dan Rencana Kerja (Renja) OPD setiap tahun anggaran sampai dengan tahun 2024.

RAD-PG Kabupaten Gresik disusun oleh perangkat daerah terkait, secara bersamasama dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik. RAD-PG Kabupaten Gresik merupakan operasionalisasi Sistem Kewaspadaan dan Gizi (SKPG) yang berisi penajaman kegiatan bidang pangan dan gizi yang sudah ada serta mengisi gap kegiatan untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

RAD-PG Kabupaten Gresik menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan kegiatan pembangunan bidang pangan dan gizi di tingkat pusat maupun di daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, termasuk upaya konvergensi penurunan stunting. RAD-PG Kabupaten Gresik penting untuk



dipedomani untuk tercapainya ketahanan pangan dan gizi yang dibagi menjadi empat tujuan strategis yaitu:

- a. Peningkatan Ketersediaan Pangan B2SA;
- b. Peningkatan Keterjangkauan Pangan B2SA;
- c. Peningkatan Pemanfaatan Pangan yang B2SA dan Pelayanan Gizi (Esensial);
- d. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi.

Pelaksanaan RAD-PG Kabupaten Gresik ini secara sinergis memerlukan dukungan pendanaan dari sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), APBD Provinsi Jawa Timur, dan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha.

Keberhasilan implementasi atas RAD-PG Kabupaten Gresik ini sangat tergantung dari partisipasi segenap pihak, mulai dari pengelola program di tingkat OPD, organisasi profesi, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dunia usaha dan juga wakil-wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik. Peran legislatif ini sangat penting dalam hal kebijakan dan dalam alokasi penganggaran. Selanjutnya langkah-langkah proaktif perlu dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Gresik dengan melibatkan peran aktif perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha termasuk perbankan sebagai bentuk implementasi dari program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility).

